



Foto dari arsip CAVR

Chega!

Bagian

2.

Mandat Komisi

Bagian 2. Mandat Komisi

79 | Pendahuluan

- 80 | Batasan waktu
- 81 | Persoalan-persoalan dengan relevansi khusus
- 81 | Makna ‘berkaitan dengan konflik politik’
- 81 | Pelanggaran Hak Asasi Manusia
- 82 | Definisi Komisi tentang ‘Pelanggaran Hak Asasi Manusia’
- 83 | Prioritas yang diberikan kepada kategori pelanggaran tertentu
- 84 | Wewenang yang berkaitan dengan penyelidikan
- 85 | Tanggung jawab hukum Komisariss dan staf
- 85 | Informasi rahasia yang diberikan kepada Komisi
- 86 | Pemakaian nama-nama tertentu dalam Laporan
- 90 | Berbagai standar yang digunakan untuk menentukan persoalan tanggung jawab dan pertanggungjawaban
- 91 | Invasi Indonesia atas Timor-Leste
- 91 | Keadilan Perang dan Keadilan dalam Perang
- 93 | Prosedur Rekonsiliasi Komunitas
- 94 | Pendekatan Komisi yang berbasis komunitas

95 | Lampiran: Prinsip-prinsip hukum yang relevan

- 95 | Pendahuluan: Hukum internasional yang relevan
 - 96 | Berbagai standar hak asasi manusia internasional
 - 97 | **Hak atas penentuan nasib sendiri**
 - 99 | **Pembunuhan di luar hukum**
 - 100 | **Penghilangan**
 - 101 | **Pemindahan, pemukiman kembali, dan kelaparan**
 - 102 | **Penahanan sewenang-wenang**
 - 103 | **Kondisi pemenjaraan**
 - 104 | **Penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat**
 - 107 | **Pengadilan yang tidak adil**
 - 108 | **Hak atas kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat, dan berkumpul**
 - 109 | **Pemeriksaan dan bentuk lain penyerangan/ pelecehan seksual**
 - 110 | **Perbudakan seksual**
 - 110 | **Hak anak**
 - 112 | **Hak sosial dan ekonomi**

- 113 | Hak reproduktif
- 113 | Hak asasi manusia dalam keadaan darurat nasional

114 | Hukum Kemanusiaan Internasional

- 114 | Pendahuluan
- 114 | Keberadaan suatu konflik bersenjata
- 115 | Status konflik di Timor-Leste: konflik bersenjata internasional atau internal?
- 117 | Perjanjian yang relevan
- 118 | Kewajiban perjanjian Indonesia
- 118 | Kewajiban perjanjian Portugal
- 120 | Kewajiban negara dan kelompok bersenjata
 - 120 | *Konflik bersenjata internasional: Invasi dan pendudukan Indonesia*
 - 120 | *Serangan terhadap penduduk dan objek sipil dilarang*
 - 123 | *Perlakuan buruk terhadap petempur musuh*
 - 124 | *Cara perang yang tidak sah*
 - 124 | *Perekrutan paksa ke dalam kegiatan militer*
 - 124 | *Kewajiban penguasa pendudukan*

126 | Boks: Apakah Timor-Leste merupakan wilayah pendudukan?

- 127 | **Konflik bersenjata internal: Perang Saudara Agustus - September 1975**
- 128 | **Kewajiban individu (tanggung jawab pidana perorangan)**
 - 128 | *Genosida*
 - 128 | *Kejahatan terhadap kemanusiaan*
 - 129 | *Agresi*
 - 129 | *Kejahatan perang*

131 | **Tanggung jawab komando**

131 | 'Tindak Pidana': Hukum domestik Portugal dan Indonesia

131 | **Pendahuluan**

132 | Boks: Hukum mana yang berlaku di Timor-Leste?

- 133 | **Hukum Portugal**
- 133 | **Hukum Indonesia**
- 135 | **Hukum militer Indonesia**

Mandat Komisi



Pendahuluan

1. Regulasi UNTAET 10/2001 mendirikan CAVR sebagai otoritas independen, dengan ketentuan bahwa badan ini “tidak ada di bawah kekuasaan atau perintah” menteri kabinet atau pejabat pemerintah lainnya.* Pendirian Komisi ini belakangan mendapat pengakuan dalam Konstitusi RDTL, pasal 162. Komisi diberi masa kerja awal 24 bulan. Tiga amandemen berikutnya oleh Parlemen Nasional atas Regulasi ini memperpanjang masa kerja Komisi, pertama-tama hingga 30 bulan, kemudian hingga 39 bulan, dan akhirnya diperpanjang sampai 31 Oktober 2005, atau 42 bulan lebih sedikit.[†]
2. Menurut mandatnya, tugas-tugas Komisi mencakup hal-hal berikut ini:
 1. Menyelidiki dan menetapkan kebenaran yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam konteks konflik politik di Timor-Leste dari 25 April 1974 sampai 25 Oktober 1999.¹ Penyelidikan tersebut meliputi:
 - konteks, sebab, anteseden, motif, dan perspektif yang mendorong timbulnya pelanggaran;²
 - apakah pelanggaran tersebut merupakan bagian dari pola pelanggaran yang sistematis;³
 - identitas orang, otoritas, institusi, dan organisasi yang terlibat dalam pelanggaran;⁴

* Regulasi 10/2001 tentang Pendirian Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor-Leste Pasal 2.2. Dalam Bagian ini, Komisi menggunakan istilah Timor-Leste jika secara khusus merujuk kepada Regulasi 10/2001 dan instrumen hukum lainnya seperti Resolusi PBB dan hukum internasional; Komisi juga secara umum menggunakan istilah Timor-Leste sebagai istilah yang digunakan selama periode mandat dalam konteks hukum internasional dan persoalan Penentuan Nasib Sendiri.

† Meski Pasal 2.4 Regulasi mengizinkan perpanjangan selama enam bulan tanpa pertimbangan parlemen, kedua perpanjangan disahkan oleh amandemen resmi terhadap Regulasi. Undang-Undang Parlemen Republik Demokrasi Timor-Leste No. 7/2003, Pasal 1 memperpanjang mandat sampai 30 bulan. Undang-Undang Parlemen Republik Demokrasi Timor-Leste No. 13/2004, Artikel 1, memperpanjang mandat sampai 7 Juli 2005. Undang-Undang Parlemen Republik Demokrasi Timor-Leste No. 11/2005, Artikel 1, memperpanjang mandat sampai 31 Oktober 2005.

- apakah pelanggaran tersebut merupakan hasil dari perencanaan, kebijakan, atau otorisasi negara, kelompok politik, kelompok militer, gerakan kemerdekaan, atau kelompok atau individu lainnya;⁵
 - peranan faktor-faktor internal maupun eksternal;⁶ dan
 - pertanggungjawaban, “secara politis atau yang lain” atas pelanggaran.⁷
2. Menyiapkan “laporan lengkap yang menggambarkan kegiatan dan putusan, berdasarkan informasi yang faktual dan objektif dan bukti yang dikumpulkan atau diterima atau diberikan pada Komisi”.⁸
 3. Merumuskan rekomendasi tentang perubahan dan inisiatif yang dirancang untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia,⁹ dan untuk menanggapi kebutuhan para korban. Rekomendasi tersebut bisa mencakup usulan mengenai langkah-langkah hukum, administratif dan lainnya yang dapat membantu tercapainya tujuan Komisi;¹⁰
 4. Merekomendasikan penuntutan, apabila perlu, kepada Kejaksaan Agung;¹¹
 5. Mendorong rekonsiliasi;¹²
 6. Melaksanakan Prosedur Rekonsiliasi Komunitas (PRK) yang bertujuan mendukung penerimaan dan reintegrasi individu yang telah merugikan komunitas mereka dengan melakukan pelanggaran pidana ringan dan tindakan merugikan lainnya;¹³
 7. Membantu memulihkan martabat para korban;¹⁴
 8. Memajukan hak asasi manusia.¹⁵

3. Komisi diberi wewenang khusus berkaitan dengan fungsi-fungsi Pencarian Kebenaran dan Rekonsiliasi Komunitas, yang tertuang secara terperinci di dalam Peraturan. Selain itu, Komisi juga diberi wewenang yang luas untuk menjalankan aktivitas apa pun yang sesuai dengan mandatnya.¹⁶ Dengan demikian Komisi diberi wewenang untuk menerapkan berbagai program yang dirancang untuk mendorong rekonsiliasi, memulihkan martabat para korban dan memajukan hak asasi manusia.

Batasan waktu

4. Mandat Komisi ini, yang berkaitan dengan pencarian kebenaran mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan juga “tindakan merugikan” yang dapat ditangani PRK, mencakup periode selama dua puluh lima setengah tahun, antara 24 April 1974 dan 25 Oktober 1999. Kedua tanggal tersebut menandai awal dan akhir periode konflik politik paling gencar di Timor-Leste. Jatuhnya rezim Marcello Caetano di Portugal pada April 1974 memberikan kesempatan kepada berbagai wilayah jajahan Portugis, termasuk Timor-Leste, untuk menggunakan hak mereka dalam menentukan nasib sendiri. Di Timor-Leste, terbukanya kesempatan politik segera menimbulkan pertarungan memperebutkan kekuasaan politik di antara berbagai partai politik utama dan disusul dengan terjadinya invasi dan pendudukan Indonesia. Setelah merebaknya kekerasan menyusul Jajak Pendapat 30 Agustus 1999,

saat mayoritas orang Timor-Leste memilih opsi merdeka, pada 25 Oktober 1999, Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 1272 yang mengesahkan berdirinya UNTAET sebagai pemerintahan transisi dengan wewenang untuk menjalankan kekuasaan administratif pemerintahan sepenuhnya atas wilayah Timor-Leste, sejalan dengan persiapan kemerdekaan negara ini.*

Persoalan-persoalan dengan relevansi khusus

5. Regulasi mewajibkan Komisi untuk “memberikan perhatian khusus” kepada tiga aspek utama konflik politik selama menjalankan fungsi pencarian kebenaran:

1. Kejadian-kejadian sebelum, selama, dan sesudah Jajak Pendapat 30 Agustus 1999;
2. Kejadian dan pengalaman semua pihak menjelang, selama, dan setelah masuknya Indonesia ke Timor-Leste pada 7 Desember 1975; dan
3. Dampak dari berbagai kebijakan dan praktik Indonesia dan angkatan bersenjata yang berada di Timor-Leste antara 7 Desember 1975 sampai 25 Oktober 1999.¹⁷

Makna ‘berkaitan dengan konflik politik’

6. Menurut Regulasi, “konflik politik di Timor-Leste” berarti perjuangan bersenjata dan tidak bersenjata dan perselisihan berkaitan dengan kedaulatan dan status politik Timor-Leste, dengan pengaturan atau pemerintahan Timor-Leste, dengan invasi dan pendudukan Indonesia secara tidak sah atas Timor-Leste, atau berbagai kombinasi hal di atas.¹⁸

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

7. Hukum nasional dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara mematuhi segala kewajiban yang dibebankan oleh negara kepada mereka. Namun, tugas untuk memajukan dan menghargai hak asasi manusia didasarkan pada kesepakatan dan kewajiban internasional dan karena itu hanya berlaku bagi negara-negara berdaulat. Karena itu, individu bisa saja melakukan kejahatan yang melanggar hukum nasional dan, dalam beberapa kasus, hukum internasional, tapi pandangan tradisional tentang hak asasi manusia ialah bahwa pelanggaran-pelanggaran ini hanya dapat dilakukan oleh negara dan aparatnya.¹⁹

8. Definisi tradisional tersebut menimbulkan kesulitan dalam perancangan mandat yang sesuai bagi kerja komisi-komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Konteks pelanggaran besar-besaran, yang menjadi sasaran penelitian atau penyelidikan komisi, sering melibatkan tidak hanya aparat negara, seperti anggota militer dan

* Resolusi Dewan Keamanan 1272 (1999) mengesahkan berdirinya UNTAET pada 25 Oktober 1999, dan memberi mandat untuk “menjalankan wewenang legislatif dan eksekutif sepenuhnya, termasuk penegakan hukum”.

polisi serta pejabat pemerintah, tetapi juga anggota kelompok oposisi, partai politik, milisi, perusahaan, dan individu lain. Penjelasan apa pun tentang “kebenaran” yang berkaitan dengan suatu konflik tidak akan lengkap bila tidak mencakup tindakan semua pihak tersebut di atas.

9. Satu contoh upaya mengatasi masalah tersebut adalah upaya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan yang menafsirkan undang-undang yang memberi mereka kewenangan mencakup “perkembangan modern dalam hukum hak asasi manusia internasional,”²⁰ yang mengakui adanya kesamaan kapasitas antara aktor negara atau bukan negara untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

10. Regulasi yang mengesahkan pembentukan Komisi mengandung definisi istilah ‘pelanggaran hak asasi manusia’ yang lebih luas daripada biasanya, yang meliputi pelanggaran berbagai standar hak asasi manusia, hukum kemanusiaan internasional, dan ‘tindakan kriminal’ yang melanggar hukum internasional atau hukum nasional. Definisi ini meliputi pelanggaran yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara.

Definisi Komisi tentang ‘Pelanggaran Hak Asasi Manusia’

11. Menurut Pasal 1(c) Regulasi, ‘pelanggaran hak asasi manusia’ berarti:

- a. Pelanggaran standar-standar internasional hak asasi manusia;
- b. Pelanggaran hukum kemanusiaan internasional; dan
- c. Tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan dalam konteks konflik politik di Timor-Leste antara 25 April 1974 sampai dengan 25 Oktober 1999.²¹

12. Pemakaian istilah ‘pelanggaran *standar* hak asasi manusia’ alih-alih ‘pelanggaran *hukum* hak asasi manusia’, dan dimasukkannya dua kategori luas dari berbagai hukum yang tidak terbatas pada pelanggaran oleh pelaku negara, jelas menunjukkan bahwa mandat Komisi tidak dimaksudkan untuk dibatasi pada pemeriksaan perilaku pelaku negara saja.

13. Karena itu, Komisi menafsirkan mandatnya mencakup tindakan apa pun yang dilakukan dalam konteks konflik politik, baik oleh perorangan, anggota kelompok, institusi, maupun oleh negara, yang melanggar sekurang-kurangnya satu standar hak asasi manusia internasional, ketentuan hukum kemanusiaan internasional, atau kejahatan yang melanggar hukum nasional atau internasional.

14. Dengan demikian, mandat ini mencakup pemeriksaan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wakil dan aparat pemerintah Indonesia (termasuk anggota pasukan keamanannya, Hansip atau kelompok pertahanan sipil lainnya, dan kelompok-kelompok milisi), pemerintah Portugal dan aparatnya, anggota Fretilin, Falintil, dan kelompok prokemerdekaan lainnya, dan anggota UDT, Apodeti, Kota, Tralabista, dan partai-partai politik lainnya, anggota negara-negara berdaulat yang lain, institusi, kelompok, serta individu-individu yang memainkan peran dalam konteks konflik politik.

15. Menurut definisi Regulasi:

- Komisi harus menyelidiki pelanggaran berbagai macam ‘standar hak asasi manusia.’ Hal ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hak-hak dan kebebasan fundamental yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (dan protokol-protokolnya); Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat; dan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak.*
- Komisi harus menyelidiki pelanggaran hukum kemanusiaan internasional, yang mengatur perilaku dalam situasi konflik bersenjata. Menurut Regulasi, berbagai standar yang harus dipertimbangkan dalam hal ini meliputi berbagai konvensi internasional utama yang relevan, termasuk Konvensi Jenewa, serta ‘hukum dan kebiasaan perang’.²²
- Komisi harus menyelidiki pelanggaran hukum pidana Portugis atau Indonesia dan hukum pidana internasional, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida.

Prioritas yang diberikan kepada kategori pelanggaran tertentu

16. Tentu saja mustahil bagi Komisi untuk menyelidiki dan melaporkan semua pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama periode mandat. Komisi telah memilih untuk menyelidiki pelanggaran hak-hak fundamental paling berat yang sesuai dengan mandat Komisi. Secara ringkas, kategori standar-standar hak asasi manusia yang menjadi pusat perhatian Komisi adalah sebagai berikut:

1. Hak atas penentuan nasib sendiri
2. Hak atas hidup (pembunuhan tidak sah dan penghilangannya)
3. Berbagai hak yang berkaitan dengan pemindahan, pemukiman kembali, dan kelaparan (hak atas makanan yang cukup, bebas dari kelaparan, hak atas air dan tempat tinggal yang layak, kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal)
4. Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang dan hak atas kondisi penahanan yang layak
5. Hak untuk tidak menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat

.....
* Pasal 1 (e) Regulasi menyatakan bahwa ‘standar internasional hak asasi manusia’ berarti standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional seperti tertuang dalam Pasal 2 Regulasi UNTAET No. 1999/1. Pasal yang relevan pada Regulasi UNTAET 1999/1 merujuk kepada instrumen internasional hak asasi manusia ini.

6. Hak atas peradilan yang adil
 7. Hak atas kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berserikat
 8. Hak-hak yang dilanggar oleh tindak perkosaan atau bentuk lain penyerangan atau pelecehan seksual (khususnya larangan atas penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat)
 9. Hak-hak yang dilanggar oleh praktik perbudakan seksual (termasuk larangan penyiksaan, hak untuk menikah dengan persetujuan penuh dan bebas, dan larangan perbudakan)
 10. Hak-hak anak (serangkaian hak termasuk hak atas 'perawatan khusus')
 11. Hak-hak sosial dan ekonomi
 12. Hak reproduksi (hak untuk berkeluarga dan kebebasan memutuskan jumlah anak serta jarak kelahiran anak-anak)
17. Dalam memutuskan apakah tindakan tertentu merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan apakah individu atau institusi bertanggung jawab atas dan/atau dapat mempertanggungjawabkan pelanggaran tersebut, Komisi menggunakan definisi-definisi tentang pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan, yang diambil dari hukum internasional. Lampiran A (Prinsip-prinsip hukum yang relevan) di akhir bagian ini menjelaskan secara terperinci berbagai definisi ini.
18. Lampiran tersebut mencakup definisi standar hak asasi manusia yang diperinci di atas dan ringkasan singkat berbagai ketentuan hukum kemanusiaan internasional, hukum pidana internasional, hukum Portugis, dan hukum Indonesia yang relevan.

Wewenang yang berkaitan dengan penyelidikan

19. Regulasi ini memberi Komisi wewenang luas untuk melakukan penyelidikan. Hal ini meliputi wewenang untuk:
- memerintahkan individu menghadiri audiensi dan menjawab pertanyaan,
 - memerintahkan penyerahan berbagai dokumen atau objek spesifik yang relevan dengan penyelidikan,
 - meminta Jaksa Penyidik dari Pengadilan Distrik untuk mengeluarkan surat perintah penggeledahan yang mengizinkan polisi menggeledah lokasi tertentu,
 - meminta informasi dari otoritas pemerintah, baik yang berada di dalam maupun di luar Timor-Leste,
 - mengumpulkan informasi dan mengadakan pertemuan di negara lain, dan
 - mengadakan audiensi publik dan audiensi tertutup serta melindungi identitas saksi-saksi tertentu dalam audiensi tersebut.²³
20. Regulasi ini menyatakan suatu pelanggaran pidana bila seseorang secara sengaja memberi informasi yang tidak benar kepada Komisi, tidak memenuhi perintah Komisi tanpa dalih yang beralasan, menghalangi Komisi dalam menjalankan

aktivitasnya, berusaha memengaruhi Komisi secara tidak wajar, mengancam atau mengintimidasi saksi, dan membuka informasi rahasia.²⁴

Tanggung jawab hukum Komisariss dan staf

21. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang biasanya berlaku bagi komisi-komisi serupa, orang-orang yang bekerja atas nama Komisi, termasuk para Komisariss, mendapatkan kekebalan terhadap tuntutan hukum “berkaitan dengan temuan, pandangan, atau rekomendasi apa pun yang dibuat dengan niat baik selama masa kerja Komisi atau yang tecermin dalam laporan akhir Komisi.”²⁵

Informasi rahasia yang diberikan kepada Komisi

22. Informasi dapat diberikan secara rahasia bila dirasa perlu.²⁶ Komisi tidak dapat dipaksa untuk memberikan informasi kepada badan atau individu mana pun, termasuk aparat pemerintah, dengan satu-satunya pengecualian apabila ada permintaan khusus dari Kejaksaan Agung.²⁷

23. “Hak Kejaksaan Agung untuk mengakses semua informasi yang diberikan kepada Komisi” berarti tidak ada jaminan yang dapat diberikan kepada calon saksi bahwa bukti dan pengakuan mereka tidak akan digunakan melawan mereka dalam proses hukum di masa yang akan datang.

24. Ketentuan ini mungkin telah menghalangi Komisi untuk memperoleh beberapa informasi penting yang bisa mendukung fungsi pencarian kebenarannya. Namun, Komisi juga menyadari bahwa Komisi ini didirikan sebagai institusi yang kerjanya, dalam beberapa hal, melengkapi proses Peradilan Kejahatan Berat. Ketentuan-ketentuan Regulasi mencerminkan keputusan kebijakan bahwa kerja Kejaksaan tidak boleh terganggu oleh fungsi pencarian kebenaran Komisi. Kebijakan ini didasarkan pada pengakuan atas pentingnya usaha membangun mekanisme yang kukuh dan jelas untuk mencapai keadilan dan meningkatkan rasa hormat kepada supremasi hukum, dalam konteks negara baru yang rapuh, dengan sejarah yang penuh ketidakadilan. Walaupun ada keterbatasan tersebut, Komisi yakin bahwa wewenang besar yang diberikan kepada Komisi cukup bagi Komisi untuk menyusun Laporan yang memuat penjelasan yang kuat, objektif, dan komprehensif tentang pelanggaran yang terjadi selama periode konflik.

25. Dalam upaya mencapai tujuannya, Komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki “orang-orang, otoritas, institusi, dan organisasi yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia”, apakah pelanggaran tersebut merupakan bagian dari pola pelanggaran yang sistematis, persoalan akuntabilitas yang muncul dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, dan untuk menyiapkan sebuah “laporan komprehensif yang menjelaskan aktivitas dan temuan Komisi, berdasarkan informasi yang faktual dan objektif dan bukti yang dikumpulkan atau diterima, atau yang tersedia bagi Komisi.”²⁸

26. Konsekuensi dari ketentuan-ketentuan tersebut memberi tugas bagi Komisi untuk mengumumkan temuannya sehubungan dengan identitas orang-orang,

otoritas, dan institusi yang pernah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, bila ada informasi faktual dan objektif yang mendukung temuan tersebut.

27. Komisi memakai standar ‘perdata’ tentang “perimbangan segala probabilitas untuk menentukan apakah bukti yang ada cukup memadai untuk memutuskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia sudah terjadi, dan apakah individu atau institusi tertentu bertanggung jawab dan memikul tanggung jawab. Standar ini, yang juga telah digunakan oleh sejumlah komisi serupa lainnya, mengharuskan adanya penilaian bahwa probabilitasnya lebih besar bahwa tuduhan-tuduhan yang sedang dipertimbangkan benar adanya.

Pemakaian nama-nama tertentu dalam Laporan

28. CAVR dirancang sebagai bagian dari program yang lebih besar dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan keadilan dalam hubungannya dengan tindak kejahatan di masa lalu, dan rekonsiliasi di Timor-Leste. CAVR dibentuk sebagai mekanisme yang melengkapi proses Peradilan ‘Kejahatan Berat’ yang didukung PBB. Sebelum Komisi dibentuk, Unit Penyidikan Kejahatan Berat dan Panel Khusus di Pengadilan Distrik Dili sudah dibentuk, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1272,^{*} dengan mandat menyidik dan mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan berat yang dilakukan antara 1 Januari 1999 dan 25 Oktober 1999.[†] Dengan adanya prinsip yurisdiksi universal (tidak dibatasi waktu dan tempat) Unit Penyidikan Kejahatan Berat juga diberi wewenang untuk menyidik dan mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas tindak kejahatan melawan kemanusiaan, atas kejahatan perang dan genosida, sepanjang periode mandat Komisi dari April 1974 sampai Oktober 1999.[‡]

29. Karena itu, Komisi didirikan dalam lingkungan yang sangat berbeda dengan ‘komisi-komisi kebenaran dan rekonsiliasi’ lainnya, yang mandatnya mengakui pentingnya mempersiapkan sepenuh-penuhnya kasus-kasus individu, untuk dipakai di pengadilan dalam situasi saat tidak ada keinginan dan kemampuan untuk mengadili orang-orang yang paling bertanggung jawab. Ini bukan masalah utama di Timor-Leste saat Komisi didirikan, karena penyidikan dan pengadilan bagi mereka yang paling bertanggung jawab, yang masih berada di Timor-Leste, jelas merupakan tanggung jawab suatu bagian misi UNTAET, yang diberi pendanaan cukup banyak dan mempekerjakan penyidik dan hakim internasional. Komisi Penyidikan PBB mengenai pelanggaran yang dilakukan di Timor-Leste juga memberikan rekomendasi pembentukan pengadilan internasional,²⁹ dan agar pemerintah Indonesia membentuk pengadilan *ad hoc*

* Resolusi Dewan Keamanan 1272 (1999) mengesahkan berdirinya UNTAET pada 25 Oktober 1999, yang memberi mandat untuk “melaksanakan wewenang legislatif dan eksekutif, termasuk penegakan keadilan”.

† Regulasi UNTAET 2000/16 menyatakan bahwa panel hakim yang menangani kasus-kasus ‘Kejahatan Berat’ dan di Pengadilan Banding, terdiri atas dua hakim internasional dan satu hakim Timor.

‡ Yurisdiksi universal secara jelas dituangkan dalam Regulasi UNTAET 2000/15 Pasal 2.

di Jakarta untuk mengadili mereka yang paling bertanggung jawab yang berada dalam wilayah hukumnya.

30. Untuk menghindari duplikasi proses Unit Penyidikan Kejahatan Berat, mandat Komisi memberi tugas kepada Komisi untuk melihat pola lebih luas dari pelanggaran yang terjadi selama periode dua puluh lima setengah tahun yang relevan.

31. Mandat ini secara khusus mencakup tugas untuk melaporkan konteks, latar belakang, dan faktor sejarah yang mendorong terjadinya pelanggaran, dan apakah pelanggaran ini dilakukan sebagai bagian dari pola pelanggaran yang sistematis.³⁰

32. Periode yang relevan mencakup konflik politik yang signifikan yang melibatkan faksi-faksi di Timor-Leste, invasi militer skala penuh, pelanggaran skala besar selama hampir 25 tahun pendudukan militer, dan merebaknya kekerasan dan penghancuran yang tidak terkendali pada 1999. Tidak mungkin bagi Komisi untuk memenuhi mandat untuk melaporkan pola-pola pelanggaran sepanjang periode ini, dan menentukan apakah pelanggaran ini merupakan bagian dari program pelanggaran yang sistematis, bila Komisi juga berupaya melakukan penyelidikan menyeluruh mengenai insiden-insiden utama dalam jumlah terbatas, dengan menitikberatkan pada pertanggungjawaban individu-individu tertentu secara hukum. Mandat ini mengakui pentingnya mencari dan melaporkan pola-pola yang jelas terlihat dalam ribuan kasus pelanggaran berat, memberikan penjelasan bagaimana dan mengapa pelanggaran ini terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, dan apa yang bisa dilakukan agar pelanggaran ini tidak terulang.³¹

33. Sesuai alasan di atas, perhatian utama kerja penyelidikan Komisi adalah untuk menetapkan negara dan institusi mana yang terlibat dalam pola pelanggaran sistematis. Komisi menitikberatkan pada tujuan memahami, dan melaporkan keseluruhan apa yang terjadi, sejauh hal ini bisa dicapai dalam batas waktu dan sumberdaya kerja Komisi.

34. Pernyataan dan wawancara yang diberikan kepada Komisi mencakup nama-nama ribuan orang yang diidentifikasi sebagai pelaku pelanggaran. Dalam memutuskan untuk memasukkan nama-nama ini dalam Laporan Akhir, Komisi membicarakan secara panjang lebar, selama beberapa bulan, faktor-faktor yang bertentangan yang terlibat dalam keputusan ini. Meski banyak dilakukan diskusi yang rumit, diskusi-diskusi ini menitikberatkan pada sejumlah persoalan utama, termasuk sebagai berikut:

- Baru ada keadilan dalam tingkat yang terbatas bila dibandingkan dengan pelanggaran massal yang terjadi di Timor-Leste. Mempermalukan orang di depan publik dapat memberikan kontribusi kepada pencapaian keadilan ini. Individu yang telah melakukan kejahatan berat harus disebut namanya, demi memerangi kekebalan hukum. Ini terutama penting jika pelaku bisa melakukan pelanggaran lebih lanjut terhadap korban-korban di masa mendatang.
- Komisi tidak memiliki wewenang untuk melakukan apa pun terhadap kebebasan individu seperti halnya pengadilan kriminal, atau wewenang

untuk memberi kompensasi yang memengaruhi aset individu seperti halnya pengadilan sipil. Namun, penyebutan nama seorang pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia secara terbuka berpotensi menghancurkan reputasi, karier, dan kehidupan keluarga mereka. Ini juga memiliki dampak serius dalam kehidupan pasangan dan anak-anak dari orang-orang yang namanya disebut. Karena itu, penyebutan nama harus dilandasi bukti yang kuat dan tepercaya yang menutup peluang adanya kesalahan.

- Hak fundamental semua orang yang menghadapi tuduhan berat ialah diberi peluang menjawab tuduhan tersebut. Peluang ini akan memenuhi syarat keadilan dan memastikan bahwa penjelasan tertuduh dalam kaitan dengan tuduhan dipertimbangkan sebelum keputusan mengenai tanggung jawab hukumnya dicapai. Misalnya, tertuduh mungkin bisa menjelaskan bahwa dia tidak berada di wilayah yang sama saat pelanggaran terjadi, atau bahwa orang yang menuduh mempunyai motivasi pribadi.
- Konteks kerja Komisi meliputi tantangan menyelidiki ribuan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara tetangga, Indonesia, khususnya anggota pasukan militer negara tersebut. Perlunya menemukan dan menghubungi perwira militer Indonesia untuk memberi mereka kesempatan menjawab tuduhan, terutama tuduhan yang berkaitan dengan kejadian yang berlangsung 25 tahun yang lalu, merupakan tantangan logistik besar bagi Komisi.
- Menghubungi pelaku yang menjadi tertuduh yang berada di wilayah Timor-Leste juga sangat rumit. Timor-Leste tidak mempunyai sistem pos yang berfungsi sampai ke seluruh pelosok negeri dan juga tidak ada jalur telepon darat. Angkutan ke berbagai wilayah juga tidak dimungkinkan pada musim hujan dan sulit dilakukan pada musim kering. Semua dokumen umum dihancurkan selama kekerasan pada 1999. Karena itu, tidak ada dokumen yang bisa membantu mengidentifikasi tempat pelaku mungkin tinggal, atau pernah tinggal, pada saat pelanggaran terjadi.
- Di Timor-Leste ada banyak sekali nama yang sama. Jadi, misalnya, ada ribuan orang yang mempunyai nama yang sama seperti João, Tomás, José, dan nama keluarga, seperti Guterres dan Alves. Karena itu, kemungkinan salah-identifikasi terhadap pelaku hanya berdasarkan nama sangatlah besar. Kemungkinan ini semakin besar karena di dalam banyak kasus pelaku hanya dikenal dan diidentifikasi lewat nama pertama (misalnya, João, Tomás, atau Jacinto).
- Fakta bahwa korban biasanya tidak mengetahui secara pribadi nama-nama perwira militer Indonesia yang melakukan pelanggaran, tetapi lebih sering mengenal nama-nama orang Timor-Leste yang terlibat, menyebabkan lebih banyak orang Timor-Leste yang disebut namanya, meski saksi melaporkan lebih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia. Saksi sering bisa mengidentifikasi tingkat komando para pelaku, batalion, atau unit mereka tetapi tidak tahu nama-nama pelaku.
- Fakta yang tidak menguntungkan ialah bahwa pada masa transisi pemerintahan yang rapuh, yang saat ini dijalani Timor-Leste, tidaklah realistis

untuk mengharap bahwa keselamatan para saksi yang mengidentifikasi pelaku bisa dijamin. Pada kenyataannya, Komisi pernah mengalami peristiwa saat korban yang menyebut nama pelaku dalam audiensi publik di tingkat subdistrik mendapat ancaman dan serangan kejam dari pelaku yang disebut namanya dan keluarganya, yang mengakibatkan terlukanya suami korban dan pemindahan paksa dari rumah mereka. Peluang adanya masalah berat yang ditimbulkan karena penyebutan nama pelaku tidak bisa diabaikan dalam konteks Timor-Leste.

- Mandat Komisi khususnya mencakup wewenang untuk memberikan nama-nama kepada Kejaksaan Agung Timor-Leste, dengan rekomendasi untuk diajukan ke pengadilan bila dirasa perlu.³²

35. Dalam menentukan nama-nama yang dimasukkan dalam Laporan, Komisi mencari keseimbangan antara berbagai faktor yang bertentangan tersebut. Keputusan didasarkan atas keyakinan kuat akan perlunya penyebutan nama pelaku yang paling bertanggung jawab, dan diimbangi dengan syarat fundamental bahwa Komisi, sebagai organisasi yang diberi mandat untuk memberikan rekomendasi cara-cara untuk menjamin tidak terulangnya pelanggaran hak asasi manusia, tidak boleh terlibat dalam pelanggaran hak-hak fundamental individu dengan cara apa pun.

36. Pada Bagian 8 laporan ini, “Tanggung Jawab dan Pertanggungjawaban”, Komisi menyediakan perincian-perincian berikut ini:

1. Temuan-temuan dalam kaitannya dengan tanggung jawab dan pertanggungjawaban institusi-institusi utama yang terlibat pelanggaran hak asasi manusia sepanjang masih dalam batas-batas mandat pasukan keamanan Indonesia, dan partai politik Fretilin, UDT, dan Apodeti, serta Negara-negara yang menurut temuan Komisi melakukan pelanggaran berat atas kewajiban mereka untuk mengakui dan membantu rakyat Timor-Leste untuk menentukan realitas politik, sosial, dan ekonomi mereka sendiri.
2. Nama-nama mereka yang dianggap Komisi paling bertanggung jawab atas pola pelanggaran yang paling berat yang terjadi selama periode mandat. Orang-orang ini adalah komandan senior pasukan keamanan Indonesia dan pejabat senior pemerintahan Indonesia selama periode pelanggaran massal.
3. Analisa mengenai tanggung jawab berbagai ‘institusi mikro’ yang paling sering disebut terkait dengan pelaku pelanggaran hak-hak asasi manusia. Ini termasuk kantor pejabat pemerintah yang paling sering disebut sebagai pelaku, terutama batalion dan kelompok binaan pasukan keamanan Indonesia. Daftar orang-orang yang memiliki jabatan senior di ‘lembaga-lembaga mikro’ ini, selama periode yang relevan, akan diberikan setelah ringkasan singkat mengenai pola pelanggaran.
4. Sebuah daftar berisi semua orang yang didakwa melakukan Tindak Kejahatan Melawan Kemanusiaan oleh Kejaksaan Agung Timor-Leste dalam kaitannya dengan kekerasan massal sepanjang 1999. Daftar ini juga menyebutkan apakah terdakwa sudah diadili dan dihukum oleh Panel Khusus. Daftar ini juga

mencantumkan nama-nama tertuduh yang tinggal di luar wilayah Timor-Leste, di wilayah hukum pemerintah Indonesia. Komisi berharap daftar ini akan membantu memecahkan masalah kurangnya informasi mengenai proses hukum, yang merupakan keluhan umum dari masyarakat selama operasi lapangan Komisi.

37. Komisi juga sudah mengumpulkan daftar nama pelaku yang telah diidentifikasi oleh saksi dan korban sebagai terlibat dalam berbagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Karena Komisi tidak mempunyai cukup waktu dan sumberdaya untuk menyelesaikan penyelidikan secara mendalam tentang setiap kasus pelanggaran ini, atau memberi tahu setiap orang yang terlibat, Komisi tidak memasukkan daftar ini di Laporan. Namun, Komisi, sesuai wewenangnya yang tertuang dalam Pasal 3(1)(e) Regulasi 10/2001,^{*} memberikan seluruh daftar kepada Kejaksaan Agung Timor-Leste, dengan rekomendasi bahwa setiap orang yang disebut namanya harus diselidiki lebih lanjut dan jika perlu diadili. Daftar ini juga sudah dikirim ke Kantor Presiden Republik Timor-Leste dengan rekomendasi bahwa semua orang yang disebut namanya harus dilarang menduduki jabatan pemerintahan.

38. Ribuan nama pelaku yang diidentifikasi oleh korban dan saksi dan diberikan kepada Komisi telah diganti dalam teks Laporan dengan kode yang tidak ada hubungannya dengan nama pelaku yang diidentifikasi.

39. Keputusan Komisi untuk memberikan daftar kepada Kejaksaan Agung dan Presiden dan mengganti nama-nama di teks, didasarkan pada adanya sistem yang relatif efektif dan pendanaan yang baik untuk mengadili orang-orang di Timor-Leste, kemuskilan usaha menghubungi orang-orang yang diidentifikasi agar bisa diberi kesempatan hak menjawab, sangat seringnya persamaan nama di Timor-Leste, dan kemungkinan hal ini menyebabkan kesalahan identifikasi individu, ketidakmampuan Komisi menjamin keselamatan korban yang mengidentifikasi pelaku; serta akibat skala penyelidikan dan mandatnya yang panjang, Komisi tidak bisa melakukan penyelidikan atas setiap kasus secara mendalam. Lebih jauh lagi, hal ini dilakukan untuk melindungi korban, dengan tidak memasukkan nama-nama korban pelanggaran seksual yang dilaporkan ke Komisi.

Berbagai standar yang digunakan untuk menentukan persoalan tanggung jawab dan pertanggungjawaban

40. Meskipun jelas bahwa Komisi bukan pengadilan dan tidak memiliki kompetensi untuk membuat temuan hukum, Komisi ini diwajibkan membuat temuan mengenai tanggung jawab dan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia. Untuk memenuhi tugas-tugas tersebut, Komisi menyadari bahwa ada banyak tingkat pertanggungjawaban yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Ini termasuk tanggung jawab politis, sejarah, moral, dan hukum.

^{*} Regulasi 10/2001 Pasal 3.1 "Tujuan Komisi harus mencakup: ...(e) merujuk *pelanggaran hak asasi manusia* kepada Kejaksaan Agung untuk mengadili kasus pelanggaran bila dirasa perlu."

41. Dalam kaitannya dengan kewajibannya untuk membuat temuan tentang persoalan pertanggungjawaban, Komisi sejauh mungkin telah menilai tindakan individu, negara, dan institusi terhadap aturan-aturan hukum domestik dan internasional yang berlaku dan mengikat pada saat tindakan tersebut dilakukan.

Invasi Indonesia atas Timor-Leste

42. Seperti yang telah disebutkan, mandat Komisi memberikan kepadanya suatu tugas khusus untuk mengkaji peristiwa dan pengalaman semua pihak pada saat pasukan keamanan Indonesia masuk ke Timor-Leste pada 7 Desember 1975. Masalah penggunaan kekerasan untuk memasuki wilayah negara lain diatur oleh kewajiban dan tugas negara anggota PBB dan berbagai aturan dasar hukum internasional.

43. Indonesia menjadi anggota PBB pada 28 September 1950.³ Portugal menjadi negara anggota pada 14 Desember 1955. Semua negara anggota PBB terikat oleh Piagam PBB dan berbagai kewajiban berikut:

1. Mereka harus mematuhi keputusan Dewan Keamanan PBB. Berdasarkan Piagam PBB semua negara anggota setuju untuk menerima dan menjalankan keputusan Dewan Keamanan.³³ Dalam dua kesempatan, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang menyerukan Indonesia untuk menarik pasukannya dari wilayah Timor-Leste.³⁴
2. Mereka tidak boleh menggunakan kekerasan terhadap negara lain mana pun. Larangan penggunaan kekerasan merupakan aturan fundamental dalam Piagam PBB.³⁵ Aturan ini juga merupakan salah satu aturan terpenting dalam hukum kebiasaan internasional.³⁶ Kekerasan hanya dapat digunakan untuk membela diri atau bila disetujui oleh Dewan Keamanan.³⁷ Menggunakan kekerasan untuk mencampuri perang saudara yang terjadi di wilayah negara lain juga dilarang, bahkan bila hal ini dinyatakan dilakukan atas permintaan salah satu dari kelompok bersenjata yang terlibat dalam konflik tersebut.³⁸

44. Piagam PBB juga memberi kewajiban kepada negara-negara yang mengelola wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri.³⁹ Menurut sistem PBB, Portugal adalah negara yang bertanggung jawab atas administrasi wilayah Timor-Leste. Negara pengelola mempunyai kewajiban untuk memajukan kesejahteraan penduduk di wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri yang mereka kelola, termasuk dengan menjamin perlakuan adil dan perlindungan bagi penduduk dari penganiayaan.⁴⁰

Keadilan Perang dan Keadilan dalam Perang

45. Mandat Komisi terentang sepanjang beberapa periode konflik politik yang berbeda-beda. Mandat ini mencakup kekerasan berskala kecil, yang kemudian

* Indonesia mengaku mengundurkan diri dari keanggotaan PBB pada 20 Januari 1965 tetapi bergabung kembali pada September 1966.

berujung pada konflik berskala penuh, yang dikenal sebagai “perang saudara” antara faksi-faksi di Timor-Leste, yang tak lama kemudian disusul oleh invasi dan pendudukan Indonesia atas wilayah ini, resistansi terhadap pendudukan tersebut, dan penghancuran dan kekerasan besar-besaran seputar Jajak Pendapat pada 1999. Lampiran pada akhir bab ini memaparkan secara terperinci berbagai prinsip hukum, khususnya prinsip-prinsip yang diambil dari hukum kemanusiaan internasional, yang digunakan Komisi dalam mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sepanjang periode tersebut.

46. Materi yang didapat Komisi mencakup klaim yang dibuat berbagai pihak dalam konflik bahwa mereka benar dalam memutuskan untuk melancarkan perang. Argumen ini bersandar pada keyakinan yang keliru bahwa bila suatu pihak memiliki alasan untuk melancarkan perang, pihak tersebut boleh menggunakan cara apa pun untuk bertempur dalam perang tersebut.

47. Argumen yang terkait, yang tidak didukung oleh hukum internasional, ialah bahwa karena invasi dan pendudukan tidaklah sah, semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan aparatnya setelah itu juga tidak sah dan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pada saat melawan situasi tidak sah ini dapat dibenarkan.

48. Prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional telah memandu Komisi dalam mengkaji berbagai persoalan ini.* Berdasarkan kodifikasi hukum ini, mereka yang bertempur dalam ‘perang adil’ pun hanya boleh menggunakan cara-cara yang benar untuk meraih tujuan mereka. Aturan yang sama tentang tata cara perang berlaku sama bagi semua pihak. Petempur yang memutuskan untuk mengangkat senjata untuk berperang menjadi sasaran sah dalam perang tersebut. Semua pihak yang tidak bertempur, termasuk penduduk sipil dan tawanan perang, berhak untuk dilindungi. Meskipun petempur dari semua pihak, misalnya, dapat secara sah dibunuh dalam pertempuran, mereka tidak boleh dibunuh apabila sudah tidak lagi berperan aktif dalam konflik tersebut, dan tidak pernah boleh disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi.†

49. Meskipun suatu angkatan bersenjata yang besar, bersenjata lengkap, dan profesional, yang secara tidak sah bertempur untuk memperluas batas teritorial mereka tidak bisa dianggap memiliki derajat legitimasi moral yang sama dengan orang-orang yang mengangkat senjata untuk mempertahankan rumah dan keluarga mereka dari penyerang, *namun* berbagai aturan yang mengatur perilaku selama perang berlaku sama bagi kedua pihak. Tujuan politik, bagaimanapun benarnya, tidak dapat membenarkan segala cara. Cara-cara perang yang dijalankan oleh semua pihak yang mengangkat senjata dalam konflik, harus tunduk terhadap berbagai ketentuan hukum kemanusiaan internasional. Komisi telah menerapkan berbagai standar yang relevan secara objektif dan seimbang terhadap semua pihak dalam menentukan apakah telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, serta dalam membuat temuan mengenai persoalan tanggung jawab dan pertanggungjawaban.

* Lampiran A bagian ini mempunyai analisa yang lebih lengkap tentang hukum humaniter internasional.

† Lampiran A menjelaskan aturan yang mengatur perilaku dalam konflik bersenjata.

Prosedur Rekonsiliasi Komunitas

50. Bagian IV dari Regulasi memberi Komisi mandat untuk menjalankan Prosedur Rekonsiliasi Komunitas (PRK). Bagian 9 Laporan ini memberikan penjelasan terperinci mengenai program PRK Komisi.

51. Tujuan umum PRK adalah:

membantu penerimaan dan reintegrasi orang-orang ke dalam komunitas mereka... sehubungan dengan tindakan kriminal atau non-kriminal yang dilakukan dalam konteks konflik politik di Timor-Leste antara 25 April 1974 dan 25 Oktober 1999.⁴¹

52. Regulasi mengatur secara umum prosedur PRK, tetapi juga memungkinkan penyesuaian dengan kondisi setempat. Prosedur dasarnya adalah sebagai berikut:

53. Siapa pun yang telah melakukan tindakan atau kejahatan “ringan” yang telah merugikan komunitas mereka dan berkaitan dengan konflik politik dapat memberikan kepada Komisi pernyataan yang menjelaskan aksi mereka secara terperinci.⁴² Pernyataan tersebut kemudian dipertimbangkan oleh sebuah Komite dalam Komisi sebelum diteruskan kepada Kejaksaan Agung dengan disertai rekomendasi yang memerinci mengapa kasus tersebut layak untuk ditangani melalui PRK. Dalam waktu dua minggu, Kejaksaan Agung harus memberikan pemberitahuan tertulis apabila Kejaksaan Agung bermaksud menerapkan yurisdiksi eksklusifnya atas ‘pelanggaran pidana berat’ dalam kaitannya dengan kasus tersebut. Apabila Kejaksaan Agung memutuskan untuk tidak menerapkan yurisdiksinya, kasus tersebut akan dikembalikan kepada Komisi untuk diproses.⁴³

54. Kewenangan atas kasus tersebut kemudian didelegasikan kepada Komisaris Regional, yang harus membentuk panel beranggotakan tiga hingga lima pemimpin setempat dari komunitas tempat kejadian-kejadian tersebut berlangsung. Komisaris Regional bertindak sebagai ketua panel. Sebuah audiensi diselenggarakan, dan di dalamnya deponen memberikan kesaksian dan ditanyai oleh panel. Para korban dan anggota komunitas diberi kesempatan berbicara dalam audiensi tersebut.⁴⁴

55. Pada akhir audiensi, panel mempertimbangkan dan memutuskan ‘tindakan rekonsiliasi’, seperti kerja bakti, permintaan maaf di hadapan publik, atau reparasi, yang dianggap tepat untuk dilakukan deponen agar ia dapat diterima kembali ke dalam komunitasnya.⁴⁵ Apabila deponen setuju menjalankan tindakan-tindakan tersebut, panel akan menyusun suatu Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas yang ditandatangani oleh deponen dan panel.⁴⁶ Kesepakatan tersebut kemudian didaftarkan sebagai putusan pengadilan distrik yang bersangkutan.⁴⁷ Setelah memenuhi ‘Tindakan Rekonsiliasi’ yang diminta, deponen tersebut mendapat imunitas dari tuntutan pidana di masa depan atau tanggung jawab perdata yang timbul dari pelanggaran yang diungkapkan.⁴⁸

56. Regulasi memberikan berbagai contoh kasus yang layak ditangani melalui PRK, seperti pencurian, penganiayaan ringan, pembakaran, dan pembunuhan ternak atau

penghancuran tanaman pangan.⁴⁹ Wewenang untuk menyelenggarakan Prosedur Rekonsiliasi Komunitas tidak mencakup tindakan apa pun yang akan memengaruhi wewenang eksklusif Kejaksaan Agung dan Panel Khusus Pengadilan Distrik Dili atas ‘pelanggaran pidana berat’ yakni pembunuhan, pelanggaran seksual, penyiksaan, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang.⁵⁰

Pendekatan Komisi yang berbasis komunitas

57. Kebanyakan komisi kebenaran yang lain diberi mandat untuk terutama memfokuskan diri pada tugas untuk menetapkan dan melaporkan kebenaran yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Satu pengecualian yang kentara adalah Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran Afrika Selatan, yang programnya meliputi audiensi amnesti. Di samping mengumpulkan, mengevaluasi, dan melaporkan informasi, sejumlah komisi yang lebih baru juga telah menyelenggarakan audiensi publik melalui tema yang relevan dengan kerja mereka.

58. Selain mencari dan melaporkan pelanggaran historis serta menyelenggarakan audiensi publik sebagai tema utama, Komisi juga menerapkan serangkaian program akar-rumput berbasis komunitas yang tujuannya adalah rekonsiliasi, memulihkan martabat para korban, dan memajukan hak asasi manusia.

59. Program-program ini mencakup Prosedur Rekonsiliasi Komunitas (PRK), audiensi publik lokal bagi para korban, lokakarya partisipatoris tentang sejarah pelanggaran hak asasi manusia dalam komunitas, lokakarya pemulihan korban, rancangan reparasi khusus bagi korban dengan kebutuhan mendesak, berbagai program radio yang berfokus pada persoalan rekonsiliasi lokal, dan program-program penerangan yang ditujukan bagi orang Timor-Leste di Timor Barat, Indonesia.

60. Komisi ini mengakui bahwa banyaknya dukungan dan pengakuan luas yang diterima Komisi dari penduduk Timor-Leste tidak lepas dari pendekatan berbasis komunitas yang dilakukan Komisi dalam melaksanakan mandatnya. Merumuskan, menyelenggarakan, dan menyelesaikan program yang demikian beragam memerlukan staf dan sumberdaya yang banyak. Namun, hal ini memberikan manfaat yang tak terkirakan dengan mendorong komunitas-komunitas kecil di seluruh wilayah untuk menjalankan kemitraan dengan Komisi dalam upaya mencari penyelesaian yang bersifat lokal bagi tantangan rekonsiliasi dan penyembuhan luka-luka yang disebabkan pelanggaran historis.

Lampiran: Prinsip-prinsip hukum yang relevan

Pendahuluan: Hukum internasional yang relevan dengan mandat Komisi

61. Dua jenis hukum perlu dipertimbangkan dalam menentukan makna ‘pelanggaran hak asasi manusia’ menurut definisi mandat. Pertama, hukum domestik yang berlaku di Timor-Leste dalam kurun waktu tertentu, baik hukum Portugis maupun hukum Indonesia. Yang kedua, hukum internasional, yang berisi berbagai prinsip yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan bagaimana suatu konflik bersenjata dijalankan.

62. Dua sumber utama hukum internasional adalah perjanjian dan ‘hukum kebiasaan’.^{*} Perjanjian hanya mengikat negara yang ikut serta dalam perjanjian tersebut.

63. Hukum kebiasaan internasional merupakan kodifikasi hukum yang bersifat lebih umum, yang terdiri atas aturan-aturan yang telah diterima dan diterapkan oleh sebagian besar masyarakat internasional. Aturan-aturan hukum kebiasaan internasional umumnya mengikat semua negara.[†]

64. Resolusi badan-badan PBB juga relevan untuk hukum internasional. Para anggota PBB (termasuk Indonesia dan Portugal) terikat untuk menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan.⁵¹ Meskipun resolusi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mengikat negara-negara, resolusi itu relevan dalam pembentukan hukum kebiasaan internasional,⁵² dan mewakili pandangan masyarakat Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Indonesia sebagai salah satu anggotanya.

65. Dalam mempertimbangkan bagian hukum internasional yang relevan dengan mandatnya, Komisi kadang perlu mempertimbangkan status wilayah Timor-Leste selama periode mandatnya. Untuk maksud ini, Komisi mengikuti pandangan Perserikatan Bangsa-bangsa⁵³ bahwa Timor-Leste tetap merupakan suatu wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri di bawah administrasi Portugal sepanjang periode tersebut. Jelas bahwa Indonesia tidak memiliki kedaulatan atas wilayah tersebut. Menurut hukum internasional, kedaulatan suatu wilayah tidak dapat diperoleh melalui penggunaan kekerasan secara tidak sah.⁵⁴ Integrasi yang diklaim Indonesia tidak memenuhi persyaratan apa pun yang ditentukan oleh Sidang Umum tentang integrasi sukarela dari suatu wilayah yang tak berpemerintahan sendiri ke dalam negara lain.[‡]

^{*} Lihat Artikel 38(1) Statuta Pengadilan Internasional. Sumber lain termasuk prinsip umum yang diakui dalam sistem hukum berbagai negara; tulisan para penulis hukum yang dihormati, dan keputusan pengadilan internasional.

[†] Satu-satunya perkecualian ialah saat suatu negara terus-menerus merasa keberatan dengan aturan kebiasaan yang tidak fundamental: *Fisheries Case* atau *Kasus Perikanan (Inggris melawan Norwegia)* (1951) Laporan ICJ 116 hal. 131.

[‡] Resolusi Sidang Umum 1541 (XV), 15 Desember 1960, mengakui bahwa hal ini bisa terjadi jika: 1)

Berbagai standar hak asasi manusia internasional

66. Komisi diberi mandat untuk mempertimbangkan pelanggaran terhadap ‘standar-standar hak asasi manusia internasional’.⁵⁵ Standar ini didefinisikan sebagai “standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional yang tercantum dalam Pasal 2 Regulasi UNTAET No. 1/1999.”⁵⁶ Pasal itu mengacu kepada “standar-standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional, sebagaimana tecermin, khususnya dalam:

- Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, tertanggal 10 Desember 1948;
- Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, tertanggal 16 Desember 1966, dan protokol-protokolnya;
- Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, tertanggal 16 Desember 1966;
- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, tertanggal 12 Desember 1965;
- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, tertanggal 17 Desember 1979;
- Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, tertanggal 17 Desember 1984;
- Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak, tertanggal 20 November 1989.”

67. Regulasi UNTAET 1/1999 mengacu kepada berbagai standar yang diakui secara internasional “sebagaimana tecermin khususnya dalam” berbagai instrumen internasional di atas. Karena acuan ini bersifat inklusif terhadap—namun tidak terbatas pada—instrumen-instrumen tersebut, mandat Komisi mencakup “berbagai standar yang diakui secara internasional” lainnya yang ada dalam berbagai instrumen internasional di luar daftar ini.

68. Selama periode mandat, Indonesia telah meratifikasi instrumen-instrumen berikut:

- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (13 September 1984)
- Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (28 Oktober 1998)
- Konvensi tentang Hak-hak Anak (5 September 1990) (Namun, ratifikasi perjanjian ini disahkan dengan syarat bahwa ini akan berlaku terhadap

wilayah yang diintegrasikan telah mencapai tahap pemerintahan sendiri yang maju dengan institusi politik bebas, agar warganya mempunyai kapasitas untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab melalui proses yang demokratis dan berdasar pemahaman penuh; dan 2) integrasi merupakan hasil dari ekspresi bebas warga wilayah tersebut yang bertindak dengan pemahaman penuh mengenai perubahan status mereka; keinginan mereka diekspresikan melalui proses yang demokratis dan penuh pemahaman, yang dilakukan secara adil dan berdasarkan pada pemilihan umum.

Indonesia sejauh masih konsisten dengan Undang-Undang Dasar Indonesia dan perjanjian ini tidak akan memberi hak yang tidak diberi oleh Undang-Undang Dasar tersebut)

69. Selama periode mandat, Portugal telah meratifikasi atau menerima instrumen-instrumen berikut:

- Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik (15 Juni 1978)
- Protokol Opsional Kedua tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang ditujukan untuk penghapusan hukuman mati (17 Oktober 1990)
- Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (31 Juli 1978)
- Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (24 Agustus 1982)
- Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (9 Februari 1989)
- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (30 Juli 1980)
- Konvensi tentang Hak-hak Anak (21 September 1990)

70. Penting untuk diperhatikan juga bahwa berbagai standar hak asasi manusia internasional masih tetap relevan bahkan dalam situasi konflik bersenjata. Berbagai standar ini berlaku berdampingan dengan hukum kemanusiaan internasional.⁵⁷ Lebih lanjut, tanggung jawab hak asasi manusia suatu negara berlaku atas perilakunya di luar wilayah negaranya sendiri, termasuk di dalam wilayah asing mana pun yang didudukinya.⁵⁸

Hak atas penentuan nasib sendiri

71. Tidak diragukan lagi bahwa hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri ada dalam hukum internasional. Hak tersebut dijamin oleh Pasal 1 yang tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (the International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) dan telah dikukuhkan oleh Sidang Umum PBB.⁵⁹ Hak ini telah berulang-kali diakui oleh Mahkamah Internasional sebagai hak yang ada dalam hukum kebiasaan.* Kewajiban negara-negara untuk menghormati

.....
* Lihat, yang terbaru, *Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory* (2004) ICJ pada poin 14 dari 15 hakim menyebut hak menentukan nasib sendiri: lihat keputusan pengadilan paragraf 88 dan 155-156; Pendapat terpisah dari Hakim Koroma paragraf 5; Pendapat terpisah dari Hakim Higgins paragraf 18 dan 28-31; Pendapat terpisah Hakim Koijmans paragraf 6 dan 31-33; Pendapat terpisah Hakim Al-Khasawneh paragraf 9; Pendapat terpisah Hakim Buergenthal paragraf 4; dan pendapat terpisah Hakim Elaraby paragraf 3.4; juga

hak ini begitu pentingnya sehingga dikatakan bahwa ini merupakan kewajiban masyarakat internasional sebagai suatu keseluruhan, atau kewajiban semua negara (“*erga omnes*”).⁶⁰ Komite Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa:

Hak atas penentuan nasib sendiri begitu penting karena perwujudan hak ini merupakan prasyarat penting adanya jaminan dan perlindungan yang efektif atas hak-hak perorangan dan untuk memajukan serta memperkuat hak-hak tersebut.⁶¹

72. Hak ini dikatakan dimiliki oleh “segala bangsa”. Hak tersebut tidak hanya berlaku bagi penduduk berbagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri (yakni, rakyat yang berada di bawah kekuasaan kolonial), tetapi juga bagi mereka yang hidup di bawah pendudukan asing.⁶² Rakyat Timor-Leste, kini dan selama periode mandat, adalah rakyat yang memiliki hak menentukan nasib sendiri. Antara Desember 1975 dan 1982, Sidang Umum PBB telah mengesahkan delapan resolusi⁶³ dan Dewan Keamanan mengesahkan dua resolusi lainnya⁶⁴ yang mengakui hak rakyat Timor-Leste untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan.

73. Hakikat hak tersebut ialah hak suatu bangsa untuk mengungkapkan kehendaknya dengan bebas. Hal ini melibatkan sedikitnya dua hak utama seperti dijelaskan dalam Pasal 1 yang tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yakni:

1. hak suatu bangsa untuk berpartisipasi secara bebas dalam suatu proses yang memungkinkan mereka dapat secara bebas menentukan status politiknya, dan
2. hak suatu bangsa untuk ambil bagian dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya serta mengatur kekayaan serta sumberdaya alam yang dimilikinya.

74. Pasal 1(2) yang sama dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengatakan:

Semua bangsa dapat, demi kepentingan mereka sendiri, bebas mengelola kekayaan dan sumberdaya alam mereka tanpa memengaruhi berbagai kewajiban yang muncul dari kerjasama ekonomi internasional, berdasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Bagaimana pun, suatu bangsa tidak boleh dirampas sarana kehidupannya.

dalam *Case Concerning Timor-Leste (Portugal v Australia)* (1995) Laporan ICJ 90 hal. 102, paragraf 29; dan *Advisory Opinion of 16 October 1975 (“Western Sahara”)* (1975) Laporan ICJ 12 paragraf 55-59; lihat juga *Advisory Opinion on the Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)* (1971) Laporan ICJ 16, paragraf 52-53.

75. Negara-negara diwajibkan untuk menghormati dan mendukung hak suatu bangsa untuk menentukan nasib sendiri⁶⁵ dan untuk mengambil tindakan positif untuk membantu terwujudnya hak tersebut.⁶⁶ Komite Hak Asasi Manusia mengatakan:

[S]ecara khusus, Negara-negara harus menahan diri untuk tidak ikut campur dalam berbagai masalah dalam negeri Negara-negara lain yang dengan demikian akan menghalangi penerapan hak atas penentuan nasib sendiri.⁶⁷

76. Walaupun dalam beberapa kasus mungkin terdapat berbagai kesulitan untuk menentukan apakah suatu tindakan tertentu yang menghalangi penentuan nasib sendiri telah melanggar kewajiban tersebut,⁶⁸ tidak diragukan lagi bahwa pelanggaran terjadi dalam kasus invasi dan pendudukan militer. Pandangan ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Internasional yang, mengutip sebuah resolusi Sidang Umum, mengamati bahwa:

Setiap Negara memiliki tugas untuk tidak melakukan tindak pemaksaan yang merampas dari suatu bangsa...hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.⁶⁹

77. Jika terjadi pengingkaran terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri, negara-negara lain dalam komunitas internasional berkewajiban mengakui ketidaksahan situasi itu (atau berkewajiban untuk tidak mengakuinya sebagai sesuatu yang sah) dan tidak boleh mengambil tindakan apa pun yang menolong atau membantu melestarikannya.⁷⁰

Pembunuhan di luar hukum

78. Hak untuk hidup dilindungi oleh Pasal 3 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (UDHR), dan Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Instrumen internasional tersebut mengikat semua negara sebagai suatu aturan hukum kebiasaan internasional.⁷¹ Bahkan ketika keadaan darurat mengancam kehidupan suatu bangsa, kewajiban yang berkait dengan hak untuk hidup tidak boleh dibatasi dengan cara apa pun (“dihapuskan”).⁷²

79. Pasal 6(1) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa:

Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini harus dilindungi hukum. Tidak seorang pun dapat direnggut kehidupannya secara sewenang-wenang.

80. Pemerintah suatu negara hanya diizinkan untuk mengambil nyawa seseorang di negara-negara tempat hukuman mati berlaku setelah hukuman ini dijatuhkan dalam proses peradilan yang adil oleh pengadilan yang kompeten sesuai hukum,⁷³

dan hukuman mati ini dijalankan dengan cara yang meminimalkan penderitaan fisik dan mental.*

81. Pembunuhan di luar hukum jelas merupakan pelanggaran terhadap hak atas hidup. Komisi Hak Asasi Manusia, yang mengawasi pelaksanaan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, telah berkomentar:

Perlindungan terhadap penghilangan hidup seseorang secara sewenang-wenang, yang secara eksplisit diwajibkan oleh kalimat ketiga Pasal 6 (1), merupakan suatu hal yang sangat penting. Komisi berpandangan bahwa Negara-negara peserta harus mengambil langkah-langkah tidak hanya untuk mencegah dan menghukum penghilangan nyawa seseorang melalui tindakan kriminal, tapi juga mencegah pembunuhan sewenang-wenang oleh aparat keamanannya sendiri. Penghilangan nyawa oleh pemerintah suatu Negara merupakan masalah yang teramat berat. Karena itu, hukum harus secara tegas mengontrol dan membatasi situasi saat seseorang bisa dihilangkan nyawanya oleh pemerintah suatu negara.⁷⁴

82. Satu situasi saat kematian tidak melanggar hak hidup ialah jika hal itu terjadi dalam suatu konflik bersenjata dan sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional. Namun, pengecualian ini hanya berlaku bagi pembunuhan terhadap petempur serta kematian penduduk sipil yang tidak disengaja sebagai akibat dari tindakan militer yang proporsional dan perlu. Pembunuhan sengaja terhadap penduduk sipil atau tahanan tetap merupakan pelanggaran hukum internasional. Lebih jauh lagi, Komisi Hak Asasi Manusia telah menegaskan bahwa dalam konteks hak untuk hidup, negara memiliki “tugas mulia untuk mencegah peperangan, tindakan genosida, dan tindak-tanduk kekerasan massal lainnya yang menyebabkan hilangnya nyawa secara sewenang-wenang.”⁷⁵

Penghilangan

83. Menyebabkan hilangnya seseorang merupakan pelanggaran sejumlah hak dasar manusia. Komisi Hak Asasi Manusia telah menyatakan bahwa negara-negara diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah khusus dan efektif untuk mencegah penghilangan orang, dan harus menyusun prosedur untuk menyelidiki kasus-kasus orang hilang.⁷⁶ Komite mengatakan bahwa:

Tindakan penghilangan semacam ini merupakan pelanggaran banyak hak yang tertuang dalam Kovenan, termasuk hak atas kebebasan dan keamanan seseorang (Pasal 9), hak untuk tidak menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain

* Kalau tidak, hukuman mati bisa melanggar larangan atas penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat: lihat misalnya Komisi Hak Asasi Manusia, Komentar Umum 20, paragraf 61; *Ng v Canada* (1994) HRC Comm No. 469/1991, paragraf 16.2

yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (Pasal 7), dan hak setiap orang yang dihilangkan kebebasannya untuk diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat manusia (Pasal 10). Tindakan itu juga melanggar atau merupakan ancaman berat terhadap hak atas hidup (Pasal 6).⁷⁷

84. Hak-hak lain, seperti hak untuk diakui sebagai pribadi manusia di muka hukum (Pasal 16 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), mungkin juga dilanggar.⁷⁸ Selain melanggar hak asasi korban, penghilangan dapat menyebabkan penderitaan batin yang mendalam pada kerabat korban sehingga bisa juga merupakan pelanggaran terhadap larangan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.⁷⁹ Dari sudut pandang kerabat yang ditinggalkan, penghilangan juga merupakan pelanggaran hak atas kehidupan berkeluarga, dan bilamana suatu keluarga bergantung secara ekonomi pada orang yang hilang tersebut, hal ini dapat juga menjadi pelanggaran berbagai hak sosial dan ekonomi seperti hak atas standar hidup yang layak (Pasal 11 ICESPR) dan hak atas pendidikan (Pasal 13 ICESPR).⁸⁰

Pemindahan, pemukiman kembali, dan kelaparan

85. Menurut UDHR dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, semua orang memiliki hak atas kebebasan bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat bermukim.⁸¹ Pembatasan terhadap hak-hak ini hanya diperbolehkan di dalam sebuah negara demokratis untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum, atau kesusilaan, atau hak-hak orang lain, dan pembatasan apa pun harus ditentukan oleh undang-undang, dan tidak berlawanan dengan hak-hak manusia lainnya.⁸²

86. Setiap orang berhak atas pangan yang layak⁸³ dan bebas dari kelaparan.⁸⁴ Hak ini berarti bahwa harus tersedia makanan dengan kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan gizi setiap individu.⁸⁵ Negara tidak hanya berkewajiban mengambil langkah-langkah untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini,⁸⁶ tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap orang yang berada di bawah wewenang negara memiliki akses ke bahan pangan pokok untuk memastikan bahwa rakyat bebas dari kelaparan.⁸⁷ Negara mungkin melanggar kewajiban ini secara langsung atau tidak langsung, misalnya dengan mengambil berbagai kebijakan yang secara jelas tidak sejalan dengan hak rakyat atas pangan.⁸⁸

87. Setiap orang juga memiliki hak atas air⁸⁹ dan atas perumahan yang layak.⁹⁰ Yang paling penting, setiap orang memiliki hak atas hidup.⁹¹ Komisi Hak Asasi Manusia telah menyatakan bahwa hak ini seharusnya tidak ditafsirkan secara sempit, dan hak ini termasuk kewajiban bagi negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, misalnya untuk mengurangi malnutrisi.⁹²

88. Selain prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia ini, hukum kemanusiaan internasional juga mencakup beberapa ketentuan penting mengenai pemindahan dan kelaparan (lihat di bawah).

Penahanan sewenang-wenang

89. Hak atas kebebasan pribadi dilindungi oleh Pasal 3 UDHR dan Pasal 9(1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Hak tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebebasan fisik seseorang tidak dibatasi secara sewenang-wenang.⁹³ Pasal 9 UDHR dan Pasal 9 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, secara lebih spesifik, melarang penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Larangan ini juga tertuang dalam hukum kebiasaan internasional⁹⁴ dan karena itu mengikat semua negara.

90. Pasal 9 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mengandung hak-hak spesifik berikut yang berlaku terhadap segala jenis perampasan kebebasan:

1. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penangkapan atau penahanan sewenang-wenang. Tidak seorang pun boleh dirampas kebebasannya kecuali dengan alasan-alasan dan menurut prosedur sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.
2. Siapa pun yang ditangkap harus diberitahu pada saat penangkapan tentang alasan penangkapannya dan segala tuduhan terhadapnya.
3. Siapa pun yang ditangkap atau ditahan atas tuduhan pidana harus segera dihadapkan di muka hakim atau pejabat lainnya yang diberi wewenang menurut hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan harus berhak atas pengadilan dalam suatu jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Tidak boleh menjadi suatu aturan umum untuk tetap menahan seseorang yang sedang menunggu sidang pengadilan, tapi pembebasan dapat diberikan dengan syarat adanya jaminan bahwa ia akan hadir dalam sidang-sidang pengadilan pada setiap tingkatan proses peradilan dan, jika saatnya tiba, untuk eksekusi putusan pengadilannya.
4. Setiap orang yang dirampas kebebasannya dengan penangkapan atau penahanan berhak untuk membawa perkaranya ke hadapan pengadilan, agar pengadilan tersebut segera memutuskan tentang keabsahan penahanannya atau memerintahkan pembebasannya jika penahanan itu tidak sah.
5. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah harus memiliki hak atas ganti rugi yang dapat dilaksanakan.

91. Penahanan akan terjadi sewenang-wenang, dan karenanya melanggar standar-standar hak asasi manusia, dalam sejumlah situasi. Kasus yang paling jelas adalah ketika penahanan tidak sesuai dengan hukum nasional. Sebagai tambahan, Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang menyatakan bahwa penahanan yang melanggar standar-standar hak asasi manusia lainnya juga dianggap sewenang-wenang. Kelompok Kerja ini menganggap suatu penahanan sewenang-wenang:

1. bilamana tidak terdapat dasar hukum yang dapat membenarkan penahanan itu;
2. ketika penahanan terjadi akibat penerapan hak-hak fundamental yang sah menurut hukum (sebagai contoh, kebebasan mengungkapkan atau memiliki pendapat);
3. ketika situasinya melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang demikian parah sehingga penahanan tersebut dapat dianggap sebagai sewenang-wenang (sebagai contoh, ketika tidak ada proses pengadilan yang layak atau suatu pengadilan yang adil).⁹⁵

92. Lebih umum lagi, Komisi Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa penahanan yang seharusnya sesuai hukum pun masih dapat dianggap sewenang-wenang dan melanggar Pasal 9 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik jika tidak beralasan atau tidak diperlukan dalam situasi tertentu.⁹⁶ Penahanan juga dapat terjadi sewenang-wenang, jika telah melampaui titik saat penahanan tersebut masih beralasan atau masih diperlukan dalam situasi tertentu.⁹⁷

93. Dalam kasus saat seseorang ditangkap atau ditahan dengan dakwaan pidana, orang tersebut harus segera (dalam beberapa hari)⁹⁸ dihadapkan pada hakim dan harus diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan.⁹⁹

94. Penahanan prasidang harus menjadi pengecualian, dan harus sesingkat mungkin.¹⁰⁰ Yang juga penting, Komisi Hak Asasi Manusia juga menekankan bahwa:

(J)ika apa yang disebut sebagai penahanan preventif digunakan untuk alasan keamanan publik, hal itu harus diatur dengan ketentuan-ketentuan yang sama seperti di atas, misalnya penahanan tersebut tidak boleh sewenang-wenang dan harus berdasar pada alasan-alasan dan prosedur yang diatur oleh undang-undang (Paragraf 1), alasan-alasan penahanan tersebut harus diberitahukan (Paragraf 2), dan harus ada kontrol pengadilan terhadap penahanan tersebut (Paragraf 4) serta kompensasi dalam hal terjadinya kekeliruan (Paragraf 5). Dan jika, sebagai tambahan, dakwaan pidana diajukan dalam kasus semacam ini, perlindungan penuh dari Pasal 9 (2) dan (3), serta Pasal 14 [yang mencakup hak atas peradilan yang adil], juga harus diberikan.¹⁰¹

Kondisi pemenjaraan

95. Pasal 10(1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa:

Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi, dan dengan menghormati harkat dan martabat yang melekat pada diri manusia.¹⁰²

96. Komisi Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa ketentuan ini mencerminkan “norma hukum internasional umum,”¹⁰³ dan bahwa ini “tidak boleh menyimpang dari norma-norma tersebut.”¹⁰⁴ Komisi menafsirkan ketentuan tersebut dalam arti, antara lain, bahwa setiap orang dalam tahanan tidak boleh mengalami penderitaan atau pembatasan apa pun selain yang diakibatkan oleh dicabutnya hak atas kebebasannya, dan harus diperkenankan untuk menikmati semua hak asasi manusia dengan keterbatasan-keterbatasan yang tidak bisa dihindari dalam suatu lingkungan tertutup.¹⁰⁵

97. Jika perlakuan dalam penahanan tidak memenuhi standar minimum, hal tersebut juga merupakan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.¹⁰⁶ Secara khusus, masa penahanan dalam sel isolasi atau penahanan *incommunicado* (tanpa hubungan luar) yang berlarut-larut dapat melanggar standar-standar tersebut.¹⁰⁶ Komisi Hak Asasi Manusia juga telah mengamati bahwa:

(S) tandar-standar minimum tertentu mengenai kondisi penahanan harus ditaati tanpa memandang tingkat pencapaian pembangunan Negara peserta. Ini mencakup, sesuai dengan Peraturan 10, 12, 17, 19, dan 20 dalam Peraturan Standar Minimum PBB untuk Perlakuan Tahanan, ukuran minimum ruangan dan volume kubik udara bagi setiap tahanan, fasilitas jamban yang memadai, pakaian pantas yang tidak merendahkan martabat manusia atau memalukan, penyediaan tempat tidur sendiri, dan penyediaan makanan yang bergizi yang memadai bagi kesehatan dan kekuatan. Harus dicatat bahwa ini merupakan syarat-syarat minimum yang menurut Komisi harus selalu ditaati, bahkan ketika pertimbangan ekonomi dan anggaran menyulitkan ketaatan terhadap berbagai kewajiban ini.¹⁰⁷

Penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat

98. Pasal 5 UDHR dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa tidak seorang pun bisa dijadikan sasaran penyiksaan, perlakuan, atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Penyiksaan juga dilarang menurut hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua negara.¹⁰⁸ Larangan tersebut demikian pentingnya sehingga “berada di jenjang yang lebih tinggi dalam hierarki internasional daripada hukum perjanjian dan bahkan aturan-aturan ‘umum’ kebiasaan” (dengan kata lain, hal ini merupakan ‘norma *jus cogens*’), dan tidak dapat dihindari (“dikurangi”) dalam keadaan apa pun.¹⁰⁹

.....
* melanggar Pasal 5 UDHR; Pasal 7 ICCPR, Pasal 16 CAT

99. Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau yang Merendahkan Martabat (CAT, Convention against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment) (diratifikasi oleh Indonesia pada 28 Oktober 1998), menjelaskan secara lebih terperinci suatu aturan untuk mencegah serta menghukum penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, termasuk hal-hal berikut ini:

- Setiap negara harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyiksaan di dalam wilayah mana pun yang berada di bawah yurisdiksinya;¹¹⁰
- Setiap negara juga harus mencegah terjadinya perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau yang merendahkan martabat, oleh atau atas persetujuan pejabat pemerintah;¹¹¹
- Keadaan apa pun, seperti perang atau keadaan darurat umum, tidak dapat dijadikan pembenaran bagi tindakan penyiksaan;¹¹²
- Setiap negara harus menjadikan penyiksaan sebagai pelanggaran menurut hukum pidananya;¹¹³
- Kasus-kasus tuduhan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau yang merendahkan martabat harus diselidiki dengan segera dan tidak memihak;¹¹⁴
- Setiap negara harus mendidik seluruh aparat penegak hukum sipil dan militer dan para pejabat pemerintah mengenai larangan penyiksaan, dan harus meninjau kembali secara sistematis peraturan-peraturan dan praktik yang berkaitan dengan interogasi dan penahanan tahanan untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau yang merendahkan martabat;¹¹⁵
- Pernyataan apa pun yang dibuat akibat penyiksaan tidak dapat dijadikan sebagai bukti;¹¹⁶

100. Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau yang Merendahkan Martabat mendefinisikan terjadinya penyiksaan apabila terdapat setiap unsur berikut:

- perbuatan dilakukan yang dengan sengaja mengakibatkan sakit atau penderitaan hebat;
- perbuatan dilakukan dengan tujuan menghukum, mengintimidasi, memaksa, atau mendapatkan informasi atau pengakuan, atau atas dasar diskriminasi dalam bentuk apa pun;
- perbuatan dilakukan oleh atau atas anjuran seorang pejabat pemerintah, atau dengan sepengetahuan atau persetujuan seorang pejabat pemerintah.*

* Pasal 1(1) CAT menyatakan bahwa penyiksaan berarti "tindakan apa pun, saat sakit atau penderitaan berat, baik fisik maupun mental, secara sengaja dilakukan terhadap seseorang untuk tujuan seperti mendapatkan dari orang tersebut atau orang ketiga informasi atau pengakuan, menghukum orang tersebut untuk tindakan yang dia atau orang ketiga lakukan atau ditengarai melakukan, atau mengintimidasi atau memaksa dia atau orang ketiga, atau atas alasan apa pun berdasar diskriminasi,

101. Definisi ini tidak menganggap suatu tindakan sebagai penyiksaan jika hal ini dilakukan oleh aktor nonpemerintah, seperti anggota partai oposisi atau milisi, kecuali jika hal tersebut dilakukan dengan sepengetahuan atau persetujuan pemerintah.¹¹⁷ Namun, dalam kasus-kasus saat negara tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi, faksi-faksi atau organisasi-organisasi yang secara *de facto* menjalankan fungsi-fungsi layaknya pemerintah dapat dianggap sebagai pejabat publik.¹¹⁸ (Pengecualian ini memungkinkan definisi tersebut untuk diterapkan pada berbagai tindakan yang dilakukan oleh Fretilin/Falintil setidaknya di berbagai wilayah, dan pada saat mereka menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan karena tidak adanya otoritas lain.) Definisi CAT dinyatakan sudah mencerminkan hukum kebiasaan internasional.¹¹⁹

102. Definisi penyiksaan adalah serupa menurut berbagai instrumen hak-hak asasi manusia yang lain. Komisi Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa apakah suatu perilaku merupakan penyiksaan bergantung pada “sifat, tujuan, dan tingkat keparahan dari perlakuan yang diterapkan.”¹²⁰ Namun, satu hal yang membedakan adalah bahwa konsep penyiksaan menurut Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tidak mensyaratkan keterlibatan atau persetujuan dari seorang pejabat publik. Menurut Komisi Hak Asasi Manusia:

Adalah tugas Negara peserta untuk menyediakan perlindungan bagi setiap orang melalui undang-undang dan berbagai langkah lain yang diperlukan dari berbagai tindakan yang dilarang oleh Pasal 7, baik yang dilakukan oleh orang yang bertindak dalam kapasitas resminya, di luar kapasitas resmi mereka, atau dalam kapasitas pribadi.¹²¹

103. Meskipun tidak ada perjanjian yang mendefinisikan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, namun dipahami bahwa hal ini juga mencakup berbagai tindakan yang tidak dapat dianggap penyiksaan karena tindakan-tindakan itu tidak dilakukan untuk tujuan tertentu atau tidak cukup parah. Hal ini termasuk contohnya, penyekapan di ruang terisolasi,¹²² menghambat tidur,¹²³ mengekang seseorang dalam posisi yang menyakitkan,¹²⁴ menutup kepala seseorang dengan tudung,¹²⁵ dan mengancam seseorang untuk dibunuh.¹²⁶

104. Menurut Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau yang Merendahkan Martabat, negara-negara diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat hanya jika hal itu melibatkan atau disetujui oleh seorang pejabat publik.¹²⁷ Kewajiban menurut Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik lebih luas

ketika sakit atau penderitaan hebat tersebut dilakukan atau diakibatkan oleh atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat negara atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas negara. Penyiksaan tidak termasuk sakit atau penderitaan yang muncul hanya dari sanksi sah yang tidak sengaja atau yang tersirat.” Definisi ini tidak memihak kepada definisi instrumen internasional apa pun atau undang-undang nasional yang mempunyai penerapan lebih luas: Pasal 1(2) CAT.

dan menuntut negara-negara untuk mengambil langkah untuk mencegah perlakuan semacam itu bahkan ketika dilakukan oleh kelompok-kelompok nonpemerintah atau perorangan.¹²⁸

Pengadilan yang tidak adil

105. Hak atas proses peradilan yang layak, dan pengadilan yang adil menurut hukum hak asasi manusia internasional dijamin oleh Pasal 10 dan 11 UDHR, dan Pasal 14 dan 15 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

106. Beberapa ketentuan juga relevan untuk prosedur-prosedur prasidang. Seseorang yang ditangkap karena tuduhan pidana harus sesegera mungkin diberitahu, dengan bahasa yang bisa dia mengerti, tentang tuduhan pidana terhadapnya,¹²⁹ dan sesegera mungkin diberi kesempatan untuk menghubungi pengacara yang dipilihnya sendiri.* Dia harus dihadapkan di muka hakim, dalam waktu beberapa hari,[†] dan harus diadili dalam suatu jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan.¹³⁰ Waktu dan fasilitas yang cukup harus diberikan kepada tersangka guna mempersiapkan pembelaannya di muka pengadilan.¹³¹ Hal ini termasuk memberikan akses kepada tersangka ke berbagai dokumen dan bukti lain yang diperlukan untuk persiapan perkaranya, serta kesempatan untuk berkomunikasi dengan pengacaranya.¹³²

107. Tersangka harus diadili tanpa penundaan yang tidak perlu.¹³³ Pengadilannya harus di hadapan sebuah “pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak yang dibentuk menurut undang-undang.”* Sidang pengadilan harus adil.¹³⁴ Menurut Komisi Hak Asasi Manusia, “suatu aspek dasar dari prinsip pengadilan yang adil adalah perimbangan kekuatan antara jaksa penuntut dan pembela.”¹³⁵ Ini berarti bahwa pembela harus diberi akses terhadap sumber-sumber informasi yang sama dengan jaksa penuntut, dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan perkaranya. Prinsip ini akan dilanggar, contohnya, ketika pihak penuntut menahan para saksi tanpa alasan khusus yang membenarkan tindakan semacam itu.¹³⁶ Jaksa penuntut juga tidak diperbolehkan untuk memakai bukti yang diperoleh melalui penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.¹³⁷

* Artikel 14(3)(b) ICCPR; lihat misalnya *Kelly v Jamaica* (1996) HRC Comm No 537/1993, paragraf 9.2, saat keterlambatan lima hari dalam mendapatkan akses kepada pengacara setelah ditangkap dianggap melanggar Artikel 14(3)(b).

† Komisi Hak Asasi Manusia *General Comment* 8 paragraf 2; Lihat juga *Jijon v Ecuador* (1992) HRC Comm. No. 227/88 saat keterlambatan lima hari dalam menghadapkan tahanan kepada hakim dianggap melanggar Artikel 9(3).

‡ Artikel 14(1) ICCPR; lihat juga *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, yang dirumuskan dalam Kongres Ketujuh PBB tentang Pencegahan Tindak Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan, yang berlangsung di Milan dari 26 Agustus sampai 6 September 1985 dan disahkan melalui Resolusi Majelis PBB 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985; lihat juga *Guidelines on the Role of Prosecutors*, yang dirumuskan oleh Kongres Kedelapan PBB tentang Pencegahan Tindak Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan, Havana, Cuba, tanggal 27 Agustus sampai tanggal 7 September 1990

108. Sidang pengadilan harus bersifat terbuka, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus.¹³⁸ Hak atas sidang terbuka ini dapat dilanggar bahkan ketika secara teknis sudah “terbuka”, jika secara praktis sidang tersebut tidak dapat dihadiri oleh masyarakat.¹³⁹ Hal ini dapat mencakup situasi ketika publik secara efektif diintimidasi agar tidak menghadiri sebuah sidang.

109. Seorang tersangka memiliki hak khusus berikut selama dalam sidang:

- untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;¹⁴⁰
- untuk membela dirinya sendiri atau melalui pengacara pilihannya sendiri;¹⁴¹
- untuk memeriksa (sendiri atau melalui pengacaranya) para saksi yang memberatkan, dan untuk memanggil para saksi yang meringankan;¹⁴²
- untuk mendapatkan bantuan dari seorang juru bahasa apabila si tersangka tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;¹⁴³
- untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri atau mengaku salah.¹⁴⁴ Komisi Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa ketaatan terhadap hak ini mencakup:

Tidak adanya tekanan fisik atau psikologis baik langsung atau pun tidak langsung dari otoritas penyelidik terhadap si tersangka dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan bersalah. *A fortiori*, tidaklah pantas untuk memperlakukan seorang tersangka dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 7 dari Kovenan untuk memperoleh pengakuan.¹⁴⁵

110. Jika dinyatakan bersalah, seseorang berhak mengajukan banding atas hukuman dan vonis terhadap dirinya ke pengadilan yang lebih tinggi.¹⁴⁶ Alasan tertulis bagi keputusan yang dibuat harus diberikan dalam jangka waktu yang wajar oleh pengadilan banding untuk memudahkan banding ke tingkat yang lebih tinggi.¹⁴⁷

111. Tidak seorang pun boleh ditetapkan bersalah atas tindakan pidana terkait dengan perbuatan yang tidak merupakan pelanggaran pidana pada saat tindakan itu dilakukan.¹⁴⁸

Hak atas kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat, dan berkumpul

112. Selain hak-hak prosedural ini, pengadilan politik sering melanggar hak asasi manusia yang lain. Ini mencakup, sebagai contoh:

1. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.¹⁴⁹
2. Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai.¹⁵⁰

113. Tidak boleh ada pembatasan atau pengecualian terhadap hak seseorang atas kebebasan berpendapat.¹⁵¹ Pembatasan terhadap hak atas kebebasan

mengungkapkan pendapat, berserikat, dan berkumpul secara damai hanya dibolehkan dalam keadaan yang didefinisikan secara sempit. Keadaan-keadaan ini adalah:

- Pembatasan ini harus diatur dengan undang-undang;
- Pembatasan ini harus diterapkan untuk tujuan yang masuk akal (untuk menegakkan hak-hak orang lain atau untuk melindungi keamanan negara, ketertiban umum, kesehatan umum, atau kesusilaan umum);
- Pembatasan ini harus diperlukan untuk mencapai tujuan yang dapat diterima (dalam hal kebebasan berkumpul dan berserikat, langkah ini hanya dibolehkan jika diperlukan untuk mencapai tujuan “dalam suatu masyarakat demokratis”).¹⁵²

114. Sekadar pernyataan bahwa tindakan perlu diambil demi keamanan nasional tidaklah memadai kecuali jika ada penjelasan mengapa hal tersebut harus dilakukan.¹⁵³ Persyaratan ini harus dipatuhi secara tegas. Sebagai contoh, Komisi Hak Asasi Manusia telah mengatakan bahwa:

[Kebebasan mengeluarkan pendapat] adalah teramat penting dalam masyarakat demokratis mana pun dan pembatasan apa pun terhadap penerapannya harus sesuai dengan suatu uji pembenaran yang ketat.¹⁵⁴

Pemerksaan dan bentuk lain penyerangan/pelecehan seksual

115. Meskipun tidak ada instrumen hak asasi manusia yang secara khusus membahas pemerksaan dan penyerangan seksual, penganiayaan ini merupakan pelanggaran terhadap sejumlah standar hak asasi manusia. Yang paling nyata, kasus perkosaan atau penyerangan seksual biasanya merupakan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.¹⁵⁵ Majelis Banding ICTY telah menyatakan bahwa:

Kekerasan seksual selalu menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang dalam, baik fisik atau pun mental, dan dengan demikian membenarkan hakikatnya sebagai suatu tindak peniksaan.¹⁵⁶

116. Bagaimanapun, pemerksaan melanggar hak atas integritas jasmani yang dilindungi menurut hukum kebiasaan internasional.¹⁵⁷

117. Lebih jauh lagi, pemerksaan dan penyerangan seksual melanggar hak atas lingkup pribadi.¹⁵⁸ Bila dilakukan terhadap perempuan, pemerksaan melanggar hak perempuan untuk bebas dan dilindungi dari diskriminasi berbasis-gender,¹⁵⁹ yang salah satu bentuknya adalah kejahatan seksual terhadap perempuan. Komisi Hak Asasi Manusia telah mengatakan bahwa “perempuan sangat rentan pada masa-masa konflik bersenjata internal dan internasional,” dan bahwa negara-negara harus mengambil langkah-langkah “untuk melindungi perempuan dari perkosaan, penculikan, dan bentuk kekerasan berbasis-gender lain.”¹⁶⁰

118. Banyak dari hak-hak tersebut dilindungi oleh Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Indonesia menjadi negara pesertanya pada 13 September 1984.

Perbudakan seksual

119. Kejadian-kejadian perbudakan seksual merupakan pelanggaran berulang terhadap semua hak yang telah dibahas di atas.

120. Baik UDHR maupun Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik melarang segala bentuk perbudakan,¹⁶¹ mencerminkan aturan dasar dalam hukum kebiasaan internasional.¹⁶² Komisi Hak Asasi Manusia telah membahas berbagai permasalahan perbudakan seksual dalam konteks larangan itu.¹⁶³ Dalam lingkup hukum kemanusiaan internasional, perbudakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dikatakan mencakup penerapan salah satu atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas seseorang,¹⁶⁴ dan ini bisa mencakup kasus-kasus saat perempuan ditahan untuk jangka waktu yang lama dan berulang kali diserang secara seksual.*

121. Lebih jauh lagi, menurut Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, negara mempunyai kewajiban untuk mengambil segala tindakan untuk menekan segala bentuk perdagangan perempuan.¹⁶⁵

Hak anak

122. Selain dilindungi oleh standar-standar umum hak asasi manusia seperti yang berhubungan dengan hak atas hidup, pangan, bebas dari penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang, dan hak-hak sosial dan ekonomi, anak-anak dilindungi oleh aturan-aturan khusus tambahan dalam hukum hak asasi manusia internasional yang mencerminkan syarat dalam Pasal 25 UDHR bahwa masa kanak-kanak “berhak mendapat perlakuan khusus.”¹⁶⁶ Sebagian besar aturan tersebut tercantum dalam Konvensi tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, CRC), meskipun beberapa aturan juga tertuang dalam berbagai instrumen internasional lain. Indonesia meratifikasi CRC pada 5 September 1990.[†]

123. Satu kewajiban yang paling utama adalah mendahulukan kepentingan terbaik bagi si anak sebagai pertimbangan utama ketika melakukan tindakan apa pun yang berhubungan dengan anak.¹⁶⁷

* Dalam *Prosecutor v Kunarac* perempuan ditahan dan berulang-ulang diperkosa dan diserang dan dipaksa melakukan pekerjaan di rumah tertuduh. Ini dinilai sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena melakukan perbudakan.

† Indonesia mencantumkan catatan bahwa negara ini akan menerapkan Konvensi tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasarnya dan menolak kewajiban yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar tersebut.

124. Konvensi tentang Hak Anak menyatakan bahwa anak-anak berhak atas banyak hak yang diberikan secara lebih umum oleh instrumen lainnya, termasuk hak atas hidup,¹⁶⁸ hak untuk bebas dari penyiksaan,¹⁶⁹ hak untuk bebas dari penahanan sewenang-wenang,¹⁷⁰ dan hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang bisa dicapai, dan hak untuk memiliki akses terhadap berbagai fasilitas layanan kesehatan.¹⁷¹

125. Lebih khusus lagi, Konvensi tentang Hak Anak mewajibkan negara-negara peserta untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk penderitaan fisik atau mental,¹⁷² segala bentuk eksploitasi dan penganiayaan seksual,¹⁷³ serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.¹⁷⁴ Konvensi tentang Hak Anak juga menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu standar kehidupan yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.¹⁷⁵ Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang di bawah umur 18 tahun.¹⁷⁶

126. Mengenai perekrutan anak-anak ke dalam organisasi militer atau paramiliter, standar berikut ini berlaku:

- Negara tidak boleh merekrut anak-anak di bawah usia 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata, dan harus mengambil segala langkah untuk mencegah anak-anak di bawah umur 15 tahun mengambil bagian langsung dalam permusuhan.¹⁷⁷
- Jika merekrut anak-anak berusia antara 15 dan 18 tahun ke dalam angkatan bersenjata, negara-negara peserta harus memberi prioritas kepada mereka yang berusia lebih tua.¹⁷⁸
- Anak-anak memiliki hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi, dan dari melakukan pekerjaan yang mungkin berbahaya atau membahayakan bagi si anak.¹⁷⁹

127. Sejumlah standar lainnya yang tertuang dalam Konvensi tentang Hak Anak secara khusus relevan dengan pemindahan anak-anak Timor-Leste ke Indonesia. Sebagai contoh:

- Seorang anak tidak boleh dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kemauan si anak, kecuali jika prosedur yang layak menyatakan bahwa pemisahan tersebut diperlukan demi kepentingan terbaik si anak;¹⁸⁰
- Negara harus mengambil tindakan untuk memerangi pemindahan gelap anak-anak ke luar negeri, dan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak-anak;¹⁸¹
- Negara harus mengatur proses adopsi dan memastikan bahwa adopsi dilakukan oleh pihak berwenang yang kompeten sesuai hukum;¹⁸²
- Pada saat seorang anak terpisahkan dari keluarganya, negara harus memberikan perlindungan khusus, dan sifat perlindungan ditentukan berdasarkan pada pertimbangan keberlanjutan pengasuhan seorang anak, serta latar belakang etnis, agama, budaya, dan bahasa si anak;¹⁸³

- Seorang anak berhak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama, dan hubungan keluarganya;¹⁸⁴

Hak sosial dan ekonomi

128. Hak ekonomi, sosial, dan budaya tertuang dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Beberapa juga tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (UDHR).

129. Hak-hak yang paling relevan dengan mandat CAVR adalah hak-hak berikut ini yang berlaku bagi semua orang:

- Hak untuk melakukan pekerjaan yang dipilih secara bebas,¹⁸⁵ dan atas kondisi kerja yang adil dan mendukung,¹⁸⁶ termasuk atas upah yang layak serta kondisi kerja yang aman dan sehat.¹⁸⁷
- Hak atas standar hidup yang layak bagi semua orang dan keluarganya, termasuk pangan, sandang, dan perumahan yang layak, dan peningkatan kondisi hidup yang terus-menerus.¹⁸⁸
- Hak untuk dapat menikmati standar kesehatan fisik dan mental paling tinggi yang bisa dicapai.¹⁸⁹
- Hak atas pendidikan, termasuk pendidikan dasar wajib yang cuma-cuma.¹⁹⁰

130. Diakui bahwa hak ekonomi, sosial, dan budaya berbeda dari hak politik dan budaya karena pemenuhan hak-hak itu lebih bergantung pada sumberdaya yang dimiliki oleh suatu negara. Untuk alasan ini, berbagai kewajiban negara yang terkait dengan hak-hak yang dipaparkan di atas bukanlah kewajiban untuk menjamin hak-hak tersebut secara absolut, tetapi lebih untuk mengambil langkah-langkah menuju pemaksimalan sumberdaya agar dapat memenuhi hak-hak yang sudah dijelaskan.¹⁹¹ Namun, hal ini tidak boleh ditafsirkan oleh negara sebagai alasan bagi ketidakpatuhannya dalam memenuhi berbagai kewajibannya. Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (CESC) telah menekankan bahwa Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya memberlakukan dua kewajiban khusus terhadap negara, yakni:

1. Syarat bahwa hak-hak sosial dan ekonomi akan diterapkan tanpa diskriminasi (berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau yang lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, status kelahiran, atau status yang lain)
2. kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang “terencana, nyata, dan terarah” untuk mewujudkan hak-hak yang tercantum dalam Kovenan.¹⁹²

131. Komisi juga telah mengisyaratkan bahwa Kovenan tersebut memberlakukan “suatu kewajiban pokok minimum untuk memastikan terpenuhinya setiap hak, setidaknya dalam tingkat minimum pokok,”¹⁹³ termasuk misalnya penyediaan “bahan pangan pokok, layanan kesehatan primer, tempat berlindung, dan perumahan sederhana, atau bentuk-bentuk pendidikan yang paling dasar.”¹⁹⁴

132. Juga penting untuk mengakui hubungan antara hak ekonomi dan sosial dan hak suatu bangsa atas penentuan nasib sendiri. Baik Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya maupun Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dalam memaparkan hak atas penentuan nasib sendiri, menyatakan bahwa suatu bangsa berhak secara bebas mengatur kekayaan dan sumberdaya alam bagi kebutuhan mereka sendiri, dan bahwa “suatu bangsa samasekali tidak boleh dirampas sumberdayanya untuk bertahan hidup.”¹⁹⁵

Hak reproduktif

133. Beberapa ketentuan hak asasi manusia bisa relevan dalam hal kontrol Indonesia terhadap tingkat kesuburan dan kasus-kasus KB paksa. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menjamin hak laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga.¹⁹⁶ Berkenaan dengan hak tersebut Komisi, Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

Ketika Negara-negara peserta menjalankan kebijakan keluarga berencana, kebijakan tersebut harus sesuai dengan berbagai ketentuan Kovenan, khususnya, tidak boleh bersifat diskriminatif atau wajib.¹⁹⁷

134. CEDAW menjamin bagi perempuan hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam memutuskan secara bebas jumlah dan jarak kelahiran anak-anak mereka.¹⁹⁸ Hal ini dikatakan melibatkan larangan terhadap sterilisasi atau aborsi wajib, dan mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah pemaksaan terhadap perempuan berkaitan dengan tingkat kesuburan mereka.¹⁹⁹

Hak asasi manusia dalam keadaan darurat nasional

135. Sejumlah instrumen hak asasi manusia internasional memperbolehkan negara-negara untuk menangguhkan atau membatasi (“mengurangi”) untuk sementara kewajiban hak asasi manusia mereka ketika terjadi keadaan darurat nasional.²⁰⁰ Namun, hal ini hanya boleh dilakukan dalam situasi darurat yang paling gawat, dan terdapat berbagai pembatasan mengenai sejauh mana negara dapat mengambil langkah-langkah pengurangan ini.

136. Yang paling utama, beberapa hak asasi manusia samasekali tidak boleh ditangguhkan, bahkan dalam keadaan darurat yang paling gawat sekalipun. Hak-hak tersebut mencakup:

- hak atas hidup²⁰¹
- hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan serta penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat²⁰²
- hak untuk bebas dari perbudakan dan penghambaan²⁰³
- hak setiap orang yang ditahan untuk diperlakukan dengan manusiawi²⁰⁴

- hak atas suatu peradilan yang adil²⁰⁵
- hak untuk mengajukan acara hukum untuk mempertanyakan keabsahan suatu penahanan²⁰⁶

137. Bahkan ketika penangguhan dibolehkan, hal ini hanya boleh terjadi untuk sementara waktu, dan berbagai langkah khusus yang diambil harus benar-benar perlu dalam situasi tersebut.²⁰⁷

Hukum Kemanusiaan Internasional

Pendahuluan

138. Menurut mandat CAVR, definisi ‘pelanggaran hak-hak asasi manusia’ mencakup “pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional”.²⁰⁸ Hukum kemanusiaan internasional adalah kodifikasi hukum yang memaparkan berbagai aturan yang berlaku dalam suatu konflik bersenjata. Aturan-aturan ini berlaku bagi negara, kelompok bersenjata,²⁰⁹ dan individu.

139. Hukum kemanusiaan internasional berlaku hanya ketika ada suatu ‘konflik bersenjata’. Selain itu, aturan yang berlaku akan berbeda bergantung pada apakah konfliknya bersifat ‘internasional’ atau ‘internal’.

Keberadaan suatu konflik bersenjata

Kesimpulan:

140. Komisi menilai bahwa telah terjadi suatu konflik bersenjata di Timor-Leste dari 11 Agustus 1975, sampai setidaknya akhir mandat pada 25 Oktober 1999. Hukum kemanusiaan internasional dengan demikian berlaku sepanjang periode ini.

Alasan:

141. Adanya suatu konflik bersenjata tidak mensyaratkan suatu pernyataan perang atau bahkan pengakuan resmi dari pihak-pihak yang terlibat bahwa suatu keadaan konflik bersenjata sedang berlangsung. Pengujiannya adalah apakah terjadi permusuhan nyata dalam tingkat yang melampaui “kekacauan internal” semata.²¹⁰ Suatu konflik bersenjata terjadi:

Bilamana terjadi penggunaan kekuatan bersenjata antarnegara atau kekerasan bersenjata yang berlarut-larut antara otoritas pemerintahan dan kelompok bersenjata yang terorganisasi, atau antarkelompok seperti ini dalam suatu Negara. Hukum kemanusiaan internasional berlaku sejak permulaan konflik bersenjata tersebut dan terus berlaku setelah permusuhan berakhir hingga tercapainya perdamaian; atau, dalam kasus terjadinya konflik internal, hingga dicapai penyelesaian damai. Hingga saat seperti itu, hukum kemanusiaan internasional terus berlaku di seluruh wilayah Negara-negara yang bertikai atau,

dalam kasus terjadinya konflik internal, berlaku di seluruh wilayah yang berada di bawah kekuasaan suatu pihak, tanpa memandang apakah pertempuran benar-benar terjadi atau tidak di wilayah-wilayah tersebut.²¹¹

142. Antara April dan Agustus 1974, kekerasan sporadis kecil-kecilan di Timor-Leste belum cukup untuk memicu penerapan hukum internasional. Sepanjang Agustus – September 1975, permusuhan antara Fretilin, dan UDT telah melampaui ambang kekacauan dan ketegangan kecil, dan telah lebih terorganisasi daripada sekadar kerusuhan atau tindak kekerasan sporadis. Komisi yakin bahwa sejak 11 Agustus, ketika UDT meluncurkan upaya aksi bersenjata, kedua partai dan kekuatan bersenjata yang berada di bawah kendali mereka terlibat dalam konfrontasi terbuka. Sepanjang September – November 1975, berbagai kelompok bersenjata di bawah kendali pasukan keamanan Indonesia memasuki wilayah Timor-Leste dan berhadapan dengan pasukan bersenjata di bawah kendali Fretilin hingga menjelang terjadinya invasi besar-besaran pada 7 Desember 1975. Situasi konflik bersenjata internasional dimulai ketika kelompok-kelompok bersenjata ini melintasi perbatasan, dan berlanjut setidaknya sampai akhir periode mandat Komisi, yakni 25 Oktober 1999. Meskipun kekuatan utama pasukan keamanan Indonesia dan milisi telah meninggalkan wilayah Timor-Leste pada saat itu, konflik bersenjata terus berlanjut antara kelompok-kelompok milisi di bawah kendali Indonesia dan pasukan penjaga perdamaian internasional setelah administrasi UNTAET mulai bekerja di wilayah ini pada 25 Oktober 1999.²¹²

Status konflik di Timor-Leste: konflik bersenjata internasional atau internal?

Kesimpulan:

1. Sepanjang periode mulai sekitar 11 Agustus 1975 hingga sekitar 1 Oktober 1975, hukum-hukum yang berkaitan dengan konflik bersenjata internal berlaku di Timor-Leste.
2. Hukum-hukum yang berkaitan dengan konflik bersenjata internasional berlaku mulai sekitar 1 Oktober 1975 hingga 25 Oktober 1999.

Alasan:

143. Suatu konflik bersenjata internal atau non-internasional terjadi apabila suatu konflik bersenjata terjadi di dalam wilayah satu negara, tanpa keterlibatan negara lain.²¹³

144. Suatu konflik bersenjata internasional terjadi apabila:

- konflik terjadi antara dua negara atau lebih; atau
- konflik bersenjata internal terjadi di dalam satu negara, dan negara kedua ikut campur dalam konflik tersebut dengan pasukannya; atau

- konflik bersenjata internal terjadi di dalam satu negara, dan beberapa peserta dalam konflik itu, seperti kelompok-kelompok milisi, pada kenyataannya bertindak mewakili negara kedua.²¹⁴

145. Menurut teori hukum kemanusiaan internasional, bilamana suatu konflik bersenjata terjadi, hal itu adalah suatu konflik bersenjata internasional atau konflik bersenjata non-internasional (internal). Tidak ada kategori ketiga. Namun pada praktiknya terkadang lebih sulit untuk menentukan kategori konflik.

146. Dalam kasus Timor-Leste, 'perang saudara' antara Fretilin dan UDT merupakan konflik bersenjata internal, yang terjadi di dalam wilayah satu negara (Portugal). Meskipun Indonesia mulai turut campur dalam masalah Timor-Leste ketika wilayah ini masih di bawah kekuasaan Portugal, dengan mendukung para anggota Apodeti dan bahkan memberikan pelatihan militer dan persenjataan kepada para anggotanya,²¹⁵ hal ini tidak dapat menjadikan konflik tersebut bersifat 'internasional' kecuali jika Indonesia menjalankan 'kontrol efektif' terhadap aksi-aksi Apodeti,[†] atau setidaknya memiliki 'kontrol menyeluruh' atas Apodeti.[‡] Komisi dengan demikian berpandangan bahwa 'perang saudara' tersebut berstatus konflik bersenjata internal.

147. Walaupun demikian, sejak pertengahan September 1975, dan mungkin lebih awal lagi, serangan-serangan lintas-batas dilancarkan oleh pasukan Indonesia, yang memegang kendali (dan karenanya memegang kontrol efektif dan menyeluruh) atas kelompok-kelompok Timor-Leste yang dikenal sebagai Partisan. Serangan-serangan lintas-batas ini kurang lebih terjadi pada akhir periode paling tegang dari 'perang saudara'. Serangan-serangan awal disusul oleh invasi besar-besaran oleh Indonesia pada 7 Desember 1975.

148. Sifat konflik yang terjadi di Timor-Leste berbeda dengan kebanyakan konflik bersenjata internasional yang secara jelas melibatkan pasukan dari setidaknya dua negara. Pasukan yang melawan serangan pasukan Indonesia tidak berada di bawah komando dan kendali tentara Portugal (Portugal mengundurkan diri ke Ataúro). Pasukan ini termasuk para serdadu lokal Portugal dan tentara cadangan (*segunda linha*) yang bertindak secara independen, para anggota Falintil, dan milisi-milisi bentukan Fretilin. Sepanjang pendudukan tersebut, pasukan Indonesia berperang bukan melawan tentara Portugal tapi melawan pasukan bersenjata Falintil dan resistansi terorganisasi melawan pendudukan.

149. Komisi memandang bahwa konflik yang terjadi di Timor-Leste berstatus sebagai konflik bersenjata internasional sejak Oktober 1975 karena alasan-alasan berikut:

.....
* *Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v United States of America)* (1986) ICJ Reports 4 hal. 65. ICJ menyatakan bahwa pasokan senjata dan pelatihan tidak cukup tanpa adanya bukti tentang kontrol yang lebih efektif oleh negara: lihat hal. 64.

† *Prosecutor v Dusko Tadic*, ICTY Case Number IT-94-1, Appeals Chamber Judgment, 15 Juli 1999 paragraf 120. ICTY dalam keputusan ini menolak uji 'kontrol efektif' yang dipakai ICJ di kasus *Nicaragua*. Perbedaan pendapat tetap berlanjut mengenai uji mana yang layak.

1. Telah terjadi konflik bersenjata yang cukup untuk memicu pemberlakuan hukum kemanusiaan internasional. Konflik ini jelas bukan merupakan konflik internal, karena bukan terjadi di dalam wilayah satu negara tanpa keterlibatan negara lain. Meskipun berbeda dengan situasi yang lebih umum yang melibatkan pasukan bersenjata dari dua negara berdaulat, pasukan bersenjata dari satu negara tersebut (Indonesia) bertempur di dalam wilayah negara lain (Portugal).
2. Invasi Indonesia merupakan campurtangan negara asing ke dalam konflik bersenjata internal yang tengah berlangsung, yang menjadikan konflik tersebut bersifat ‘internasional’.²¹⁶
3. Konvensi Jenewa 1949 (yang, selain Pasal Umum 3, mengatur konflik-konflik bersenjata internasional) berlaku atas “semua kasus pendudukan sebagian atau pun keseluruhan terhadap wilayah dari Pihak yang Terikat Perjanjian, bahkan jika pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata.”²¹⁷ Karena Portugal merupakan negara peserta Konvensi-konvensi Jenewa, Konvensi-konvensi ini berlaku, atas dasar ini, terhadap bagian mana pun dari Timor-Leste yang diduduki oleh Indonesia (lihat bagian Lampiran ini yang menjelaskan tentang hukum pada pendudukan yang kejam).

Perjanjian-perjanjian yang relevan

150. Hukum kemanusiaan internasional, seperti bidang-bidang lain dari hukum internasional, sebagian besar terdiri atas berbagai perjanjian dan peraturan hukum kebiasaan internasional.* Hukum kebiasaan yang berlaku dalam situasi-situasi konflik bersenjata disebut sebagai ‘hukum dan kebiasaan perang’. Sementara perjanjian hanya mengikat negara-negara peserta perjanjian tersebut, hukum kebiasaan mengikat semua negara.

151. Mandat Komisi mendefinisikan ‘hukum kemanusiaan internasional’ mencakup:

- Keempat Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949;
- Kedua Protokol Tambahan Konvensi Jenewa, yakni 12 Agustus 1949, dan yang terkait Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional dan non-Internasional (8 Juni 1977);
- Konvensi tentang Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Persenjataan Konvensional Tertentu yang Dianggap Merusak Secara Luas atau Memiliki Dampak yang Tidak Pandang Bulu (10 Oktober 1980); dan
- Hukum dan kebiasaan perang.²¹⁸

.....
 * Yang meliputi, di antaranya, isi Regulasi Den Haag 1907: lihat *Advisory Opinion on the Treat or Use of Nuclear Weapons* (1996) ICJ Reports 226 hal. 257-258 (mengutip keputusan Nuremberg IMT); *Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Palestinian Occupied Territories* (2004) ICJ paragraph 89.

152. Berbagai ketentuan yang tercakup dalam sumber-sumber ini relevan dengan mandat Komisi untuk menguji pelanggaran terhadap berbagai *standar* yang diakui oleh masyarakat internasional yang terkait dengan perilaku perang, tanpa memandang apakah pada waktu mereka melakukan aksinya, ketentuan itu secara hukum mengikat pihak tertentu.

153. Namun, juga berguna untuk mempertimbangkan ketentuan mana yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut secara hukum. Ini mencakup berbagai kewajiban setiap pihak terhadap perjanjian dan ketentuan-ketentuan dalam hukum kebiasaan internasional yang dikenal sebagai 'hukum dan kebiasaan perang'.

Kewajiban-kewajiban perjanjian Indonesia

154. Sejak awal periode mandat, Indonesia merupakan negara peserta dari berbagai perjanjian hukum kemanusiaan berikut:

- Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 (Indonesia menjadi peserta pada 30 September 1958);
- Konvensi Den Haag untuk Perlindungan Warisan Budaya dalam Situasi Konflik Bersenjata tertanggal 14 Mei 1954 (Indonesia menjadi peserta pada 10 Januari 1967);
- Protokol Pertama Konvensi Den Haag 1954 untuk Perlindungan atas Warisan Budaya dalam Situasi Konflik Bersenjata tertanggal 14 Mei 1954 (Indonesia menjadi peserta pada 26 Juli 1967); dan
- Protokol Jenewa untuk Pelarangan Penggunaan Gas PENCEKIK, BERACUN, atau yang Lainnya dan Peperangan tertanggal 17 Juni 1925 (Indonesia menjadi peserta pada 21 Januari 1971).

155. Indonesia juga menjadi negara peserta berbagai konvensi berikut sepanjang periode mandat:

- Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, dan Penyimpanan Senjata Biologis dan Beracun, dan tentang Pemusnahan Senjata Tersebut tertanggal 10 April 1972 (Indonesia menjadi peserta pada 19 Februari 1992); dan
- Konvensi tentang Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Persenjataan Konvensional Tertentu yang Dianggap Dapat Merusak secara Luas atau Memiliki Dampak yang Tanpa Pandang Bulu (tertanggal 10 Oktober 1980) (Indonesia menjadi peserta pada 12 November 1998).

Kewajiban-kewajiban perjanjian Portugal:

156. Pada awal periode mandat, Portugal merupakan peserta perjanjian-perjanjian relevan berikut:

- Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 (Portugal menjadi negara peserta pada 14 Maret 1961); dan
- Protokol Jenewa untuk Pelarangan Penggunaan Gas PENCEKIK, BERACUN, atau yang Lainnya, dan Peperangan, tertanggal 17 Juni 1925 (Portugal menjadi peserta pada 1 Juli 1930).

157. Selama periode mandat, Portugal menjadi peserta sejumlah perjanjian hukum kemanusiaan internasional lain, termasuk:

- Protokol Tambahan Pertama pada Konvensi Jenewa, tertanggal 8 Juni 1977 (Portugal menjadi negara peserta pada 27 Mei 1992)
- Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, dan Penyimpanan Senjata Biologis dan Beracun, dan tentang Pemusnahan Senjata Tersebut, tertanggal 10 April 1972 (Portugal menjadi peserta pada 15 Mei 1975)
- Konvensi tentang Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Persenjataan Konvensional Tertentu yang Dianggap Dapat Merusak secara Luas (CCW), tertanggal 10 Oktober 1980 (Portugal menjadi peserta pada 4 April 1997)
- Protokol I CCW tentang Fragmen yang tidak dapat dideteksi (Portugal menjadi negara peserta pada 4 April 1997)
- Protokol II CCW tentang Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Ranjau, Perangkap, dan Alat-alat lainnya (Portugal menjadi negara peserta pada 4 April 1997)
- Protokol III CCW tentang Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Pembakar (Portugal menjadi negara peserta pada 4 April 1997)
- Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, dan Penyimpanan Senjata Kimia, dan tentang Pemusnahannya, tertanggal 13 Januari 1993 (Portugal menjadi peserta pada 10 September 1996)
- Konvensi tentang Pelarangan Penggunaan, Penyimpanan, Produksi, dan Pengiriman Ranjau Anti-Personil, dan Pemusnahannya, tertanggal 18 September 1997 (Portugal menjadi peserta pada 19 Februari 1975)
- Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, tertanggal 9 Desember 1948 (Portugal menjadi peserta pada 9 Februari 1999)

158. Meskipun demikian, karena Portugal bukan merupakan pihak yang terlibat dalam sebagian besar durasi konflik itu—kalau tidak dalam sepanjang konflik—dan mengingat Indonesia bukan merupakan peserta sebagian besar konvensi tersebut di atas, maka konvensi itu hanya memiliki relevansi yang kecil terhadap konflik ini.

Kewajiban negara dan kelompok bersenjata

Konflik bersenjata internasional: Invasi dan pendudukan Indonesia

159. Konvensi Jenewa 1949 berlaku dalam “semua kasus pendudukan total atau sebagian terhadap wilayah dari Pihak yang Terikat Perjanjian, bahkan jika pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata.”

160. Konvensi tersebut dengan demikian berlaku dalam konflik bersenjata internasional yang melibatkan pasukan Indonesia dalam wilayah hukum Portugal, sejak permulaan konflik bersenjata internasional tersebut dan selama masa pendudukan Indonesia.*

161. Selain itu, rangkaian lengkap hukum dan kebiasaan perang berlaku dalam konflik tersebut.

162. Beberapa prinsip utama yang tercantum dalam sumber-sumber ini adalah sebagai berikut:

1. Serangan terhadap penduduk dan objek sipil dilarang

163. Salah satu aturan fundamental dalam konflik bersenjata internasional adalah prinsip pembedaan. Aturan ini menyatakan bahwa harus ada pembedaan antara penduduk dan objek-objek sipil di satu sisi, dengan berbagai pihak yang bertempur (petempur) dan sasaran militer di sisi lain. Pihak-pihak yang terlibat konflik hanya boleh menyerang petempur dan sasaran-sasaran militer lawan. Mahkamah Internasional menyebut aturan ini sebagai prinsip dasar utama dalam hukum kemanusiaan internasional.²¹⁹

164. Prinsip ini mencakup sejumlah aturan yang lebih khusus:

165. Serangan tidak boleh dilancarkan langsung terhadap penduduk sipil, objek sipil, atau kota atau gedung yang tidak dipertahankan.²²⁰ Tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan dengan tujuan mengintimidasi atau menyeror penduduk sipil atau menyandera penduduk sipil.²²¹ Serangan terhadap objek budaya, tempat ibadah, atau objek yang penting untuk kelangsungan hidup penduduk sipil (seperti tempat-tempat yang digunakan untuk produksi makanan) dilarang.²²² Bahkan jika satu pihak yang terlibat dalam konflik melanggar aturan ini, pihak yang lain tidak boleh membalas dengan menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran.²²³ Penghukuman kolektif terhadap penduduk sipil dilarang; artinya, jika seseorang dicurigai melakukan tindak kriminal atau bertempur untuk pihak lawan dalam suatu konflik, pihak lawan tidak boleh menghukum teman, keluarga, atau komunitas orang itu.²²⁴

.....
* Pasal 2 yang umum tertuang dalam Konvensi-Konvensi Jenewa menyatakan bahwa konvensi-konvensi berlaku dalam “semua kasus pendudukan total atau sebagian dalam wilayah dari Pihak yang Terikat Perjanjian, meskipun pendudukan tersebut tidak menemui resistansi bersenjata.” Portugal, yang merupakan penguasa administratif Timor-Leste, merupakan peserta Konvensi Jenewa selama periode mandat.

166. Menggunakan kelaparan penduduk sipil sebagai alat peperangan dilarang, sebagaimana halnya penghancuran atau pemindahan benda yang penting untuk kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti makanan, tanaman pangan, ternak, instalasi air minum, atau alat produksi pangan.²²⁵ Pihak yang terlibat dalam konflik harus mengizinkan masuknya bantuan secara bebas, termasuk pasokan obat-obatan serta makanan dan pakaian untuk anak-anak dan ibu hamil.²²⁶

167. Serangan tidak boleh dilancarkan dengan menggunakan metode atau persenjataan yang tidak mungkin dapat membedakan antara sasaran sipil dan militer.²²⁷

168. Korban sipil dan kerusakan terhadap objek sipil akibat serangan terhadap sebuah sasaran militer dibolehkan hanya sepanjang tidak berlebihan dalam hal kepentingan serangan tersebut dari sisi militer.²²⁸ Serangan harus dilakukan dengan cara yang akan meminimalkan jatuhnya korban sipil dan kerusakan terhadap objek-objek sipil.²²⁹ Sejauh mungkin, peringatan dini harus diberikan kepada penduduk sipil akan datangnya serangan yang bisa membahayakan penduduk sipil.²³⁰

169. Hukum kebiasaan juga melarang “pemalsuan identitas”. Ini berarti bahwa petempur dilarang memalsukan status sipil (atau status orang lain yang dilindungi, seperti petempur yang terluka) untuk melancarkan serangan.²³¹

170. Protokol Jenewa I, mendefinisikan penduduk sipil dan objek-objek sipil sebagai berikut:*

171. Orang sipil mencakup semua orang di dalam wilayah terkait kecuali para anggota:

- angkatan bersenjata, termasuk milisi dan unit relawan yang merupakan bagian dari angkatan bersenjata;
- milisi atau gerakan resistansi; dan
- penduduk dalam sebuah wilayah yang secara spontan mengangkat senjata untuk melawan invasi;²³²

172. Jika tidak jelas apakah seseorang adalah penduduk sipil atau bukan, orang tersebut harus diperlakukan sebagai seorang sipil.²³³ Kehadiran beberapa individu yang bukan penduduk sipil di antara penduduk sipil tidak mengubah status sipil penduduk tersebut.²³⁴ Hal ini berarti bahwa meskipun di dalam suatu kota ada beberapa petempur, kota tersebut tidak boleh dijadikan sasaran militer.

173. Semua objek dan gedung kecuali ‘sasaran militer’ dikategorikan sebagai sipil, dan karena itu dilindungi.²³⁵ Sasaran militer adalah objek yang memberikan kontribusi efektif untuk aksi militer, dan perusakan atau perebutan objek tersebut memberikan keuntungan militer.²³⁶

* Meskipun perjanjian ini sendiri tidak berlaku dalam konflik di Timor-Leste karena Indonesia tidak menandatangani, ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pembedaan dikatakan mencerminkan hukum kebiasaan: lihat misalnya Christopher Greenwood, “The Customary Law Status of the 1977 Geneva Protocols”, dalam Astrid J.M. Delissen dan Gerrard J. Tanja (editor) *Humanitarian Law of Armed Conflict: Challenges Ahead*, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1991, hal.109.

174. Jika gerilyawan turut serta dalam suatu konflik, mereka harus membedakan diri dari orang sipil. Menurut ketentuan hukum dan kebiasaan perang, dan Konvensi Jenewa Ketiga 1949, para pejuang seperti itu harus:

- menjadi bagian dari organisasi yang dikomandoi oleh seseorang yang bertanggung jawab atas anak buahnya;
- mengenakan tanda pembeda tertentu yang dapat dikenali dari jauh atau membedakan mereka dari penduduk sipil;^{*}
- membawa senjata terang-terangan; dan
- secara umum melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.[†]

175. Standar yang lebih longgar berlaku untuk orang-orang yang mengangkat senjata secara spontan melawan tentara invasi tanpa waktu yang cukup untuk membentuk unit resmi yang terorganisasi. Mereka hanya diwajibkan untuk membawa senjata terang-terangan dan secara umum mematuhi hukum dan kebiasaan perang.²³⁷

176. Pihak yang tidak mematuhi persyaratan ini saat terlibat dalam pertempuran tidak berhak diberi status Tawanan Perang jika tertangkap,²³⁸ dan kehilangan status sipilnya sebagai akibat dari keterlibatannya, menjadikan mereka sasaran yang sah menurut hukum. Terkadang orang seperti ini disebut ‘petempur tak sah’ atau ‘tidak memiliki hak’. Mereka dapat diadili dan dihukum atas keterlibatannya dalam pertempuran. Namun, penting untuk diketahui, meskipun orang sipil tidak diizinkan untuk terlibat dalam pertempuran tanpa mematuhi persyaratan ini, mereka selalu diizinkan bertindak untuk membela diri.

177. Komisi berpandangan bahwa, pada umumnya, anggota Falintil cukup patuh dengan ketentuan di atas. Falintil memiliki struktur komando dan disiplin yang relatif ketat dan ditaati, membawa senjata secara terang-terangan, dan secara umum melaksanakan operasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang. Sejak permulaan konflik, para anggota Falintil mengenakan seragam tentara Portugal. Pada 1980, kebanyakan seragam tersebut menjadi usang, dan dalam beberapa kesempatan diganti dengan pakaian seragam militer tak resmi. Meskipun demikian, perpaduan antaraencana, seragam, serta aspek lain yang sangat dapat dibedakan,

.....
* Tujuan ketentuan dalam Pasal 1 Regulasi Den Haag dan Pasal 4A(2) Konvensi Jenewa III ialah agar petempur memakai tanda pengenal yang bisa dilihat dari jauh untuk memungkinkan musuh membedakan anggotanya (yang merupakan sasaran militer sah) dari penduduk sipil (yang bukan sasaran militer sah). Karena alasan ini, mungkin menurut hukum kebiasaan hal ini kemudian dituangkan ke dalam ketentuan yang lebih longgar dalam Pasal 43(3) Protokol Tambahan Pertama Konvensi Jenewa 1977 bahwa anggota kelompok harus membedakan diri dari penduduk sipil dengan cara tertentu. Mungkin ketentuan yang lebih longgar ini mencerminkan kebiasaan yang ada pada 1977 atau menjadi kebiasaan setelah tahun itu: lihat Christopher Greenwood, “Customary Law Status of the 1977 Geneva Protocols”, dalam Astrid J.M. Delissen dan Gerard J. Tanja (editor), *Humanitarian Law of Armed Conflict: Challenges Ahead*, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1991, hal.107.

† Pasal 1 Regulasi Den Haag 1907 dan Pasal 4A(2) Konvensi Jenewa III. Meski persyaratannya yang lebih ringan tertuang dalam Artikel 44(3) Protokol Tambahan Pertama Konvensi Jenewa, perjanjian itu tidak berlaku dalam konflik di Timor-Leste dan dalam hal ini tidak mencerminkan hukum kebiasaan.

seperti misalnya para anggota Falintil menerapkan suatu kebijakan yang seragam dan eksklusif untuk memanjangkan rambut, membuat mereka mudah dibedakan dari jarak jauh..²³⁹

2. Perlakuan buruk terhadap petempur musuh

178. Menurut hukum perang, aturan-aturan khusus berlaku terhadap para petempur yang telah jatuh ke tangan musuh.

179. Kebanyakan petempur yang berada di tangan musuh berhak atas status Tawanan Perang. Petempur di sini mencakup:

- para anggota angkatan bersenjata, termasuk milisi yang menjadi bagian dari angkatan bersenjata;
- orang yang mendampingi angkatan bersenjata sebagai pendukung atau dalam peran logistik;
- para anggota milisi atau gerakan resistansi yang telah memenuhi syarat untuk membedakan diri dari orang sipil (termasuk dengan mengenakan seragam yang membedakan dan terang-terangan membawa senjata), dan
- penduduk suatu wilayah yang secara spontan mengangkat senjata untuk melawan invasi, tanpa punya waktu untuk mengorganisasi diri ke dalam struktur militer, tetapi yang terang-terangan membawa senjata dan mematuhi hukum dan kebiasaan perang.*

180. Jika tidak jelas apakah seseorang berhak atas status Tawanan Perang, dia harus diperlakukan sebagai seorang Tawanan Perang sampai pengadilan yang kompeten menentukan statusnya.²⁴⁰ Para tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi.²⁴¹ Mereka tidak boleh disiksa, dibunuh, atau dijadikan sasaran intimidasi atau penghinaan.²⁴² Mereka harus diberi makanan, air, dan perawatan medis apa pun yang diperlukan.²⁴³ Mereka harus dijauhkan dari daerah yang rawan serangan selama kegiatan militer.²⁴⁴

181. Para petempur yang jatuh ke tangan musuh tapi tidak berhak atas status Tawanan Perang, misalnya para pejuang perlawanan yang tidak mematuhi persyaratan untuk membedakan diri dari orang-orang sipil, masih berhak atas standar perlakuan tertentu. Menurut Konvensi Jenewa IV, orang yang berada di wilayah pendudukan yang dicurigai bertindak bermusuhan dengan penguasa pendudukan, harus diperlakukan dengan manusiawi dan berhak memperoleh pengadilan yang adil.²⁴⁵ Bagaimanapun, para petempur yang tidak sah tetap berhak atas perlakuan manusiawi menurut hukum

* Artikel 4 Konvensi Jenewa III; Artikel 44(1), (3) dan (4) Protokol Jenewa I. (Ini termasuk petempur yang sakit atau terluka: Artikel 14 Konvensi Jenewa I).

internasional umum* dan atas perlindungan hukum hak asasi manusia yang melarang pembunuhan di luar hukum, peniksaan, dan penahanan sewenang-wenang, dan yang menjamin hak atas pengadilan yang adil (lihat bagian Lampiran ini tentang Pembunuhan di Luar Hukum [paragraf 78 – 82], Penghilangan [paragraf 83 – 85], Penahanan Sewenang-wenang [paragraf 89 – 94], Peniksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat [paragraf 98 – 104], dan Pengadilan yang tidak adil [paragraf 105 – 111]).

3. *Cara-cara perang yang tidak sah*

182. Menurut hukum konflik bersenjata, persenjataan dan teknik-teknik ('cara-cara perang') yang boleh digunakan untuk menimbulkan kerugian terhadap pasukan lawan dibatasi.²⁴⁶ Dua prinsip umum berlaku:

1. Dilarang menggunakan cara-cara perang yang dapat mengakibatkan luka atau penderitaan yang berlebihan atau tidak perlu;²⁴⁷
2. Dilarang menggunakan cara perang yang tidak memungkinkan si penyerang memisahkan sasaran militer dengan orang sipil ('cara yang tidak pandang bulu').²⁴⁸ Larangan ini mencakup taktik seperti meracuni sumber air dan upaya membuat penduduk kelaparan.²⁴⁹

4. *Perekrutan paksa ke dalam kegiatan militer*

183. Menurut hukum dan kebiasaan perang, dilarang untuk memaksa warga negara musuh untuk berpartisipasi dalam operasi perang yang ditujukan kepada negaranya sendiri.²⁵⁰ Konvensi Jenewa IV juga melarang penguasa pendudukan memaksa orang sipil untuk berdinasi dalam angkatan bersenjata atau pasukan binaan mereka.²⁵¹ Larangan ini juga mencakup tekanan atau propaganda yang ditujukan untuk mendorong keikutsertaan dalam dinas militer.²⁵²

5. *Kewajiban penguasa pendudukan*

184. Penting dicatat bahwa penguasa pendudukan tidak memperoleh kedaulatan atas wilayah yang diduduki. Sebaliknya, pendudukan harus merupakan kondisi sementara, dan penguasa pendudukan memiliki kewajiban tertentu terhadap penduduk lokal. Kewajiban ini merupakan tambahan atas berbagai kewajiban yang telah dijelaskan di atas mengenai permusuhan. Beberapa dari aturan yang paling penting dan relevan adalah:

* Lebih khususnya, dengan memberlakukan Klausula Martens (yang tertuang dalam Konvensi Den Haag IV 1907 dan sejumlah konvensi lain), termasuk 'prinsip kemanusiaan': Lihat *Report of the International Law Commission on the Work of Its Forty-sixth Session*, 2 Mei - 22 Juli 1994, GAOR A/49/10, hal. 317; *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996) ICJ Reports 226 hal. 257 dan 259, dan *The Dissenting Opinion of Judge Shahabuddeen* (Pendapat Berbeda Hakim Shahabuddeen) hal.406-408.

- Penduduk sipil berhak atas penghormatan terhadap dirinya sebagai pribadi, atas kehormatan, hak-hak keluarga, keyakinan beragama, adat dan kepemilikan, dan atas perlakuan manusiawi pada umumnya;²⁵³
- Penguasa pendudukan tidak boleh menyebabkan penderitaan fisik terhadap penduduk sipil;²⁵⁴
- Penguasa pendudukan harus memastikan bahwa penduduk menerima makanan, air, dan perawatan medis yang mencukupi, termasuk dengan mengimpor sumberdaya atau menerima bantuan jika pasokan lokal tidak mencukupi;²⁵⁵
- Penguasa pendudukan harus melindungi anak-anak dengan memastikan bahwa institusi untuk perawatan dan pendidikan mereka berjalan, dan dengan menahan diri agar tidak merekrut mereka dalam dinasny.²⁵⁶

185. Meskipun penguasa pendudukan diizinkan,²⁵⁷ bahkan diwajibkan,²⁵⁸ untuk memulihkan ketertiban umum, cara yang dapat digunakan untuk melakukan hal ini tidaklah tanpa batas. Penguasa pendudukan tidak boleh:

- mewajibkan penduduk di wilayah pendudukan untuk bersumpah setia pada penguasa pendudukan²⁵⁹
- menghalangi orang untuk mendapatkan hak atas suatu peradilan yang adil²⁶⁰
- melakukan pemindahan atau deportasi paksa baik secara individu maupun massal terhadap penduduk lokal atau memindahkan warganya sendiri ke dalam wilayah pendudukan,²⁶¹ atau
- membatalkan undang-undang dan lembaga hukum yang ada dalam wilayah pendudukan, kecuali bila diperlukan untuk mempertahankan pemerintahan dan keamanan;²⁶² atau menyelenggarakan peradilan pidana di luar wilayah pendudukan²⁶³

186. Penguasa pendudukan dapat memaksa penduduk sipil untuk bekerja (dengan upah yang layak), tetapi hanya bila diperlukan untuk kebutuhan tentara pendudukan atau untuk memastikan berfungsinya fasilitas umum atau penyediaan makanan, papan, dan layanan medis.²⁶⁴ Namun penguasa pendudukan tidak boleh:

- menyuruh penduduk sipil untuk berdinasi dalam pasukan bersenjata atau pasukan binaan penguasa pendudukan, atau menjadikan mereka sasaran tekanan atau propaganda sehingga mendorong mereka untuk mendaftar²⁶⁵
- memaksa anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk bekerja,²⁶⁶ atau
- memaksa penduduk sipil untuk memberi informasi mengenai pasukan resistansi atau cara perlawanan mereka²⁶⁷

187. Penguasa pendudukan dapat menggunakan sumberdaya dalam wilayah pendudukannya, tetapi hanya sampai batas yang diperlukan untuk menutupi biaya pendudukan. Penguasa pendudukan tidak boleh menggunakan sumberdaya lokal untuk memperkaya penduduknya sendiri atau membiayai operasi militer pada umumnya.²⁶⁸

188. Penguasa pendudukan dilarang menyita hak milik pribadi,* kecuali untuk kebutuhan tentara pendudukan apabila pengambilalihan ini sebanding dengan sumberdaya di negara tersebut dan mendapat imbalan sebagai gantinya.²⁶⁹

Apakah Timor-Leste merupakan wilayah pendudukan?

Suatu wilayah dianggap diduduki saat wilayah ini benar-benar berada di bawah kekuasaan tentara invasi.²⁷⁰ Hal ini dapat terjadi jika:

- penguasa pendudukan berada dalam posisi untuk mengganti otoritas wilayah pendudukan yang sudah tidak mampu berfungsi dengan layak melalui otoritasnya sendiri;
- pasukan musuh telah dikalahkan atau ditarik mundur, meskipun perlawanan lokal masih berlanjut;
- penguasa pendudukan memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat otoritasnya terasa;
- pemerintahan sementara telah dibentuk di wilayah tersebut;
- penguasa pendudukan telah mengeluarkan instruksi kepada penduduk sipil dan meminta kepatuhan penduduk.²⁷¹

Kekuasaan Indonesia atas wilayah Timor-Leste meningkat secara bertahap setelah invasi pada 1975. Komisi menilai bahwa setidaknya sejak Desember 1978 sampai September 1999, tanda-tanda ini telah terjadi di Timor-Leste, dan bahwa Indonesia telah cukup berkuasa atas wilayah ini sehingga bisa dianggap sebagai kekuatan pendudukan. Meskipun resistansi berlanjut, hal itu tidaklah cukup untuk meniadakan status pendudukan tersebut.

* Pasal 46 Regulasi Den Haag; memperbandingkannya dengan bangunan umum milik negara, yang bisa dipakai oleh tentara pendudukan.

Konflik bersenjata internal:

Perang Saudara Agustus – September 1975

189. Sumber-sumber utama hukum kemanusiaan yang berlaku selama berlangsungnya konflik bersenjata internal adalah:

- Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa 1949, dan
- Bagian-bagian dalam hukum dan kebiasaan perang.

190. Pasal Umum 3 mewajibkan pihak yang bertikai untuk memberikan perlakuan yang manusiawi kepada orang yang tidak mengambil bagian aktif dalam permusuhan, termasuk para anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata atau sedang tidak mampu bertempur (*hors de combat*) karena sakit, luka, penahanan, atau sebab lain. Dalam kaitannya dengan orang-orang tersebut, dilarang untuk melakukan tindakan berikut:

- kekerasan, khususnya pembunuhan, mutilasi, perlakuan yang kejam, dan penyiksaan;
- penyanderaan;
- penghinaan harga diri seseorang, khususnya perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan martabat; dan
- pemutusan hukuman atau pelaksanaan eksekusi tanpa pengadilan yang adil.

191. Prinsip-prinsip umum lainnya telah menjadi bagian dari hukum dan kebiasaan perang, dan berlaku selama terjadinya konflik bersenjata internal. Banyak dari aturan ini ditujukan untuk melindungi penduduk sipil:^{*}

- Serangan tidak boleh dilancarkan terhadap penduduk sipil;²⁷²
- Dalam melaksanakan operasi militer, semua tindakan pencegahan yang memungkinkan harus diambil untuk melindungi penduduk sipil;²⁷³
- Dilarang menyerang permukiman penduduk sipil atau bangunan-bangunan lain, atau menyerang tempat atau daerah perlindungan sipil seperti rumah sakit;²⁷⁴
- Dilarang menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran pemindahan paksa atau tindakan pembalasan (tindak pembalasan terhadap pelanggaran hukum kemanusiaan yang dilakukan oleh pasukan musuh);²⁷⁵
- Harus selalu ada perbedaan antara penduduk sipil dan orang-orang yang terlibat dalam konflik ('petempur').²⁷⁶ Ini berarti bahwa petempur sendiri harus membedakan tampilan mereka dari orang-orang sipil, agar memungkinkan bagi petempur musuh untuk dapat membatasi serangannya

^{*} lihat Resolusi Sidang Umum PBB 2444 (XXIII), 19 Desember 1968 dan Resolusi Sidang Umum PBB 2675 (XXV), 9 Desember 1970, keduanya diakui sebagai deklarator hukum kebiasaan oleh ICTY dalam *Prosecutor v Tadic, Appeals Chamber Decision on Jurisdiction* (Keputusan Pengadilan Banding tentang Yurisdiksi), paragraf 110-112; dan lihat secara lebih umum *Prosecutor v Tadic, Appeals Chamber Decision on Jurisdiction* (Keputusan Pengadilan Banding tentang Yurisdiksi), paragraf 100-119.

pada sasaran petempur dan militer. ‘Pemalsuan Identitas’ juga dilarang.*

192. Aturan fundamental hukum dan kebiasaan perang lain yang berlaku selama terjadinya konflik bersenjata internal adalah aturan yang membatasi cara dan persenjataan yang boleh digunakan.²⁷⁷ Aturan dasar yang mengatur cara perang yang diperbolehkan adalah sama dengan aturan-aturan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional.²⁷⁸ Prinsip-prinsip ini melarang metode dan persenjataan yang:

- Mengakibatkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tak perlu,²⁷⁹ atau
- Yang, karena sifatnya, tidak dapat membedakan antara sasaran sipil dan militer (“cara-cara yang tidak pandang bulu”).²⁸⁰

Kewajiban individu (tanggung jawab pidana perorangan)

193. Mandat Komisi secara khusus mencakup ‘tindak kejahatan’ yang dilakukan di Timor-Leste selama periode yang relevan.

194. Hukum kebiasaan internasional melarang para individu untuk melakukan kejahatan berikut ini:

Genosida

195. Genosida terjadi bila seorang melakukan salah satu dari tindakan terlarang berikut ini terhadap suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama, dengan maksud khusus untuk menghancurkan kelompok tersebut seluruhnya atau sebagian:

1. membunuh anggota kelompok tersebut;
2. menyebabkan luka fisik atau mental terhadap anggota kelompok itu;
3. menciptakan kondisi hidup tertentu terhadap suatu kelompok dengan tujuan untuk menghancurkan kelompok itu seluruhnya atau sebagian;
4. menerapkan berbagai tindakan untuk mencegah kelahiran;
5. memindahkan anak-anak secara paksa dari satu kelompok ke kelompok lainnya.²⁸¹

Kejahatan terhadap kemanusiaan

196. Kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi jika salah satu dari tindakan yang dilarang berikut ini dilakukan sebagai bagian dari penyerangan yang luas atau sistematis terhadap penduduk sipil:

.....
* *Prosecutor v Dusho Tadic*, ICTY Case Number IT-94-1, *Appeals Chamber Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction* (Keputusan Pengadilan banding tentang Mosi Pengacara untuk Banding tentang Yurisdiksi), 2 Oktober 1995, paragraf 125. Lihat bagian mengenai hukum internasional: kewajiban negara dan kelompok bersenjata, paragraf 159 - 188.

1. pembunuhan
2. pembasmian (termasuk dengan tidak memberi makanan²⁸²)
3. perbudakan
4. deportasi atau pemindahan paksa penduduk
5. kerja paksa
6. pemenjaraan
7. penyiksaan
8. pemerkosaan
9. penindasan atas dasar politik, ras, atau agama
10. tindakan tak manusiawi lainnya²⁸³

Agresi

197. Kejahatan agresi pada awalnya dikatakan terjadi ketika seseorang merencanakan, mempersiapkan, memulai, atau menjalankan perang agresi atau perang yang melanggar perjanjian, kesepakatan, atau jaminan internasional, atau turut serta dalam rencana umum untuk melakukan tindakan tersebut.²⁸⁴

198. Namun, belakangan ini komunitas internasional tidak bisa mencapai kesepakatan mengenai definisi dari kejahatan ini.²⁸⁵

Kejahatan perang

199. Dua kategori kejahatan perang berlaku dalam konteks konflik bersenjata internasional. Yang pertama disebut sebagai ‘pelanggaran berat’ terhadap Konvensi Jenewa. Suatu ‘pelanggaran berat’ terjadi bila salah satu dari tindakan berikut dilakukan terhadap orang-orang yang rentan, khususnya yang terdampar, sakit, atau terluka, tawanan perang, dan penduduk sipil:

1. Pembunuhan disengaja
2. Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk eksperimen biologis
3. Secara sengaja menyebabkan penderitaan atau luka badan atau sakit yang berat
4. Perusakan yang luas, dan perampasan harta benda yang tidak dapat dibenarkan oleh keperluan militer dan dilakukan secara tidak sah dan semena-mena
5. Memaksa seorang tawanan perang atau penduduk sipil untuk menjadi anggota angkatan bersenjata kekuatan musuh
6. Secara sengaja merampas hak tawanan perang atau penduduk sipil atas pengadilan yang adil dan reguler
7. Deportasi atau pemindahan yang tidak sah atau pengekangan tidak sah seorang penduduk sipil

8. Menyandera orang sipil²⁸⁶

200. Kategori kedua mencakup pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hukum dan kebiasaan perang termasuk, antara lain, sebagai berikut:

1. Pembunuhan, perlakuan buruk, atau pengusiran penduduk sipil di wilayah yang diduduki
2. Pembunuhan atau perlakuan buruk terhadap tawanan perang
3. Penjarahan harta benda milik pribadi dan umum
4. Perusakan kota dan desa secara sembarangan, atau penghancuran yang tidak bisa dibenarkan oleh keperluan perang²⁸⁷
5. Penggunaan senjata beracun atau senjata yang dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan yang tidak perlu
6. Penyerangan atau pengeboman kota, desa, permukiman, atau gedung yang tidak dipertahankan
7. Penyitaan, penghancuran, atau perusakan terhadap institusi yang ditujukan untuk kegiatan agama, amal, dan pendidikan, seni budaya dan ilmu, monumen bersejarah, dan karya seni dan ilmiah²⁸⁸
8. Secara sengaja melancarkan serangan kepada penduduk sipil dan objek sipil²⁸⁹
9. Menyandera orang²⁹⁰
10. Pemerkosaan²⁹¹
11. Penyiksaan (baik yang melibatkan pejabat publik atau murni orang awam)²⁹²
12. Membunuh atau melukai petempur yang sudah menyerah
13. Pemindahan oleh Penguasa Pendudukan sebagian dari penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya, atau deportasi atau pemindahan penduduk wilayah yang diduduki
14. Memaksa warga negara musuh untuk ambil bagian dalam operasi-operasi perang yang ditujukan kepada negaranya sendiri
15. Menggunakan keberadaan penduduk sipil dan orang-orang lainnya yang dilindungi untuk menjadikan wilayah-wilayah kebal dari operasi militer
16. Menggunakan senjata atau cara-cara perang yang mengakibatkan luka berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu, atau yang pada hakikatnya tidak membedakan sasaran
17. Dengan sengaja menggunakan pelaparan penduduk sipil sebagai cara perang dengan tidak memberi mereka hal-hal penting untuk bertahan hidup, termasuk sengaja menghalang-halangi pasokan bantuan*

201. Dalam konflik bersenjata internal, kejahatan perang hanya terdiri atas pelanggaran terberat terhadap Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa atau terhadap hukum

* Paragraf (12) sampai (17) adalah contoh dari Pasal 8 Statuta ICC yang diyakini Komisi mencerminkan kejahatan perang menurut hukum kebiasaan.

dan kebiasaan perang.²⁹³ Pelanggaran berat Pasal Umum 3 mencakup tindakan-tindakan berikut bila dilakukan terhadap orang-orang yang tidak mengambil bagian aktif dalam permusuhan, termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjatanya atau yang sakit, terluka, atau dalam penahanan:

1. Kekerasan terhadap hidup atau pribadi, khususnya segala jenis pembunuhan, mutilasi, perlakuan kejam, dan penyiksaan
2. Melakukan serangan terhadap martabat seseorang, khususnya perlakuan yang menghina dan merendahkan
3. Menyandera orang, dan
4. Menjatuhkan hukuman dan menjalankan eksekusi tanpa adanya keputusan sebelumnya yang dibuat oleh pengadilan reguler, yang memberikan segala jaminan hukum yang sudah umum diakui sebagai syarat yang harus ada²⁹⁴

202. Pelanggaran-pelanggaran lain terhadap hukum dan kebiasaan perang yang merupakan kejahatan perang dalam suatu konflik bersenjata internal mencakup:

1. Melancarkan serangan terhadap penduduk sipil
2. Melakukan perkosaan atau pelanggaran seksual lainnya^{*}

Tanggung jawab komando

203. Menurut hukum internasional tidak hanya orang yang secara langsung melakukan kejahatanlah yang bertanggung jawab, tetapi juga atasan orang tersebut, khususnya di militer atau di pemerintahan. Seorang atasan akan bertanggung jawab langsung jika kejahatan yang dilakukan bawahannya adalah atas perintahnya. Selain itu, seseorang yang berada dalam posisi sebagai atasan (baik secara hukum maupun *de facto*), dan yang memiliki kendali efektif atas para bawahannya,²⁹⁵ akan memiliki tanggung jawab komando jika kejahatan dilakukan oleh seorang bawahan, dan atasan mengetahui atau seharusnya tahu tentang kejahatan tersebut dan tidak melakukan tindakan apa pun untuk mencegah atau menghukumnya.²⁹⁶

‘Tindak Pidana’: Hukum domestik Portugal dan Indonesia

Pendahuluan

204. Mandat Komisi mencakup referensi terhadap ‘tindak pidana’ yang terjadi di Timor-Leste selama periode terkait. Istilah ini tidak didefinisikan dalam regulasi UNTAET yang terkait dengan Komisi. Komisi menilai bahwa hal ini dimaksud untuk mencakup pelanggaran hukum pidana domestik dan internasional yang berlaku di wilayah Timor-Leste dalam masa yang relevan.

* Lihat misalnya Artikel 8(2)(e)(i) dan (vi) yang dinilai Komisi mencerminkan hukum kebiasaan internasional.

Hukum mana yang berlaku di Timor-Leste?

Tidak diragukan lagi bahwa pada awal periode mandat Komisi, hukum yang berlaku di Timor-Leste adalah hukum Portugis. Hukum ini tetap berlaku setidaknya sampai invasi Indonesia.

Lebih sulit untuk mengatakan hukum mana yang berlaku pada masa pendudukan Indonesia. Walaupun Indonesia dilarang menurut hukum internasional untuk menerapkan hukumnya di wilayah Timor-Leste yang didudukinya, jelas bahwa pada kenyataannya hukum Indonesialah yang diterapkan dan ditegakkan.

Pengadilan Banding Timor-Leste berpendirian bahwa karena aneksasi Indonesia telah melanggar hukum internasional, hukum Indonesia tidak pernah berlaku di Timor-Leste dan hukum Portugis terus berlaku.²⁹⁷

Sebaliknya, Panel Khusus untuk Kejahatan Berat berpendapat bahwa Pengadilan Banding telah salah dalam penerapan hukum Portugis, dan bahwa hukum Indonesia pada kenyataannya berlaku.²⁹⁸ Parlemen Timor-Leste juga telah mengesahkan undang-undang yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku sebelum 25 Oktober 1999, dan kemudian berlaku sejak itu, adalah undang-undang Indonesia.²⁹⁹

Kekuasaan pendudukan harus memberlakukan seluruh hukum pidana yang ada dalam wilayah pendudukan, satu-satunya pengecualian ialah hukum yang mengancam keamanan kekuasaan pendudukan atau menghambat penerapan Konvensi Jenewa.³⁰⁰ Dengan demikian, penerapan secara besar-besaran sistem hukum dan undang-undang domestik dari kekuasaan pendudukan adalah hal yang dilarang.³⁰¹ Bila ini terjadi, maka kekuasaan pendudukan melanggar kewajibannya menurut hukum kemanusiaan. Namun, tidak jelas apakah hukum yang baru atau diimpor menjadi tidak sah di dalam wilayah pendudukan.

Karena itu, mungkin menurut hukum internasional hukum Portugis tetap berlaku dilihat dari segi hukum, namun dalam kenyataannya hukum Indonesialah yang berlaku secara *de facto*. Karena alasan ini, Komisi menilai bahwa kedua kodifikasi hukum relevan bagi mandatnya berkaitan dengan periode pendudukan Indonesia.

Hukum Portugal

205. Pada 25 April 1974, awal periode mandat CAVR, hukum Portugal adalah hukum domestik yang berlaku di Timor-Leste. Hukum Portugallah yang mengatur tindakan-tindakan berbagai pihak yang berpartisipasi dalam kekerasan menjelang dan selama perang saudara 1975.

206. Hukum Pidana Portugal sebagaimana berlaku pada 1975 mencakup larangan terhadap perilaku sebagai berikut:

207. Kejahatan terhadap kebebasan pribadi, termasuk:

- menahan orang yang bebas³⁰²
- menggunakan kekerasan fisik untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu³⁰³
- menahan, menangkap, memenjarakan, atau menyekap seseorang secara tidak sah,³⁰⁴ khususnya bila kekerasan atau ancaman pembunuhan, penyiksaan, atau penyerangan digunakan,³⁰⁵ atau ketika seseorang disandera³⁰⁶
- menggunakan kekerasan terhadap orang yang ditahan secara sah³⁰⁷

208. Kejahatan terhadap seseorang, termasuk:

- pembunuhan dan percobaan pembunuhan, khususnya jika tindakan tersebut direncanakan atau disertai dengan penyiksaan atau perlakuan kejam³⁰⁸
- penyerangan, khususnya yang mengakibatkan sakit, luka, penderitaan mental, atau kematian³⁰⁹
- menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata api atau senjata berpeluru³¹⁰

209. Dalam kasus yang melibatkan provokasi atau bela diri, pembelaan-diri dapat mengurangi atau membatalkan tanggung jawab atas tindak pidana semacam ini.³¹¹

210. Kejahatan yang melibatkan kerusakan harta benda, termasuk:

- penjarahan rumah³¹²
- pembakaran³¹³
- merusak sebagian atau seluruh bangunan milik orang lain atau negara³¹⁴
- merusak atau menghancurkan fasilitas umum³¹⁵
- merusak tanaman pertanian atau ternak³¹⁶
- merusak harta benda dalam kerusuhan³¹⁷

Hukum Indonesia

211. Hukum Indonesia mulai berlaku di Timor-Leste setelah wilayah ini dianeksasi sebagai provinsi Indonesia ke-27 melalui Undang-Undang No. 7/76, tertanggal 17 Juli 1976.³¹⁸ Walaupun aneksasi Indonesia terhadap Timor-Leste melanggar hukum internasional, Komisi menilai bahwa hukum Indonesia relevan dalam hal apa pun

karena hukum inilah yang mengatur tindak-tanduk orang-orang Indonesia di Timor-Leste, yang dalam banyak kasus melanggar tidak hanya hukum internasional, tetapi juga hukum Indonesia itu sendiri. Selain itu, sah atau tidak, hukum Indonesia secara *de facto* digunakan untuk mengatur tindakan orang Timor-Leste.

212. Komisi tidak memasukkan dalam penyelidikannya tindakan yang secara teknis melanggar hukum Indonesia, jika hukum tersebut merupakan pelanggaran standar hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, dan hak atas penentuan nasib sendiri. Hukum Indonesia mengandung banyak ketentuan yang melarang kegiatan politik yang dianggap mengancam kewenangan negara. Ketentuan ini terdapat misalnya dalam Undang-undang tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan-kegiatan Subversif,³¹⁹ Undang-undang mengenai Kegiatan Politik,³²⁰ serta beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.

213. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh warga sipil dan pejabat, termasuk angkatan bersenjata. Jenis-jenis perilaku berikut ini merupakan tindak pidana menurut KUHP:

214. Kejahatan terhadap keselamatan umum seseorang, termasuk:

- dengan sengaja membakar, menimbulkan ledakan, merusak jaringan listrik, atau merusak atau menghancurkan bangunan, khususnya jika hal ini mengancam harta benda atau nyawa atau mengakibatkan kematian;³²¹
- meracuni sumber air umum.³²²

215. Kejahatan seksual dan yang terkait, termasuk:

- pemerkosaan;*
- bersetubuh dengan perempuan di bawah usia 15 tahun;³²³
- menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan atau membiarkan tindakan yang tidak senonoh, atau melakukan tindakan tidak senonoh terhadap seseorang yang tidak sadar atau tidak berdaya, atau perempuan di bawah usia 15 tahun;³²⁴
- perdagangan perempuan atau anak laki-laki.³²⁵

216. Kejahatan terhadap kebebasan pribadi, termasuk:

- berpartisipasi dalam perbudakan;³²⁶
- penculikan;³²⁷
- menculik seseorang di bawah umur, khususnya bila dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan;³²⁸
- merampas kebebasan seseorang, khususnya jika terjadi luka fisik yang berat atau kematian.³²⁹

.....
* Pasal 285 KUHP (Pemukosaan didefinisikan hanya mencakup hubungan seksual dengan seorang perempuan di luar pernikahan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Menurut Pasal 286 KUHP melakukan hubungan badan di luar nikah dengan seorang perempuan yang tidak sadar atau tidak berdaya juga dilarang).

217. Kejahatan terhadap hidup dan pribadi seseorang, termasuk:

- pembantaian;³³⁰
- pembunuhan;³³¹
- perlakuan buruk, khususnya jika hal ini menyebabkan luka fisik yang berat atau kematian, atau jika direncanakan;³³²
- secara sengaja menimbulkan luka fisik yang berat terhadap orang lain ('penganiayaan berat'), khususnya bila direncanakan.³³³

218. Kejahatan terhadap harta benda, termasuk:

- pencurian, khususnya jika dilakukan selama kebakaran, ledakan, atau keadaan kacau yang disebabkan oleh perang, atau bila disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan³³⁴
- secara sengaja menghancurkan atau merusak harta benda milik orang lain, jaringan listrik, atau air bersih, atau bangunan³³⁵

219. Kejahatan terhadap ketertiban umum dan kejahatan serupa, termasuk:

- menghalangi seseorang memberikan suara secara bebas dalam suatu pemilihan umum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;³³⁶
- menghalangi pertemuan publik yang sah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;³³⁷
- menghalangi pertemuan keagamaan publik yang sah atau upacara penguburan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;³³⁸
- menguburkan atau menyembunyikan jenazah dengan maksud untuk menyembunyikan kematiannya.³³⁹

220. KUHP menentukan bahwa jika seorang pejabat (termasuk anggota angkatan bersenjata³⁴⁰) melakukan kejahatan dengan menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau fasilitas yang dimilikinya karena jabatan yang dipegangnya, hukuman untuk pelanggaran tersebut akan ditingkatkan sebesar sepertiga.³⁴¹ Selain itu, tindak pidana tertentu oleh pejabat dilarang, termasuk:

- penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat untuk memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau untuk membiarkan sesuatu;³⁴²
- penggunaan unsur paksaan oleh seorang pejabat untuk mendapatkan pengakuan atau pernyataan dalam suatu kasus pidana.³⁴³

Hukum militer Indonesia

221. Selain ketentuan-ketentuan pidana umum dalam KUHP, anggota militer Indonesia diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan undang-undang lain khusus untuk militer.³⁴⁴

222. Walaupun Indonesia adalah negara peserta Konvensi Jenewa 1949, Indonesia belum memasukkan substansi dari konvensi-konvensi tersebut ke dalam hukum militernya. Ini berarti bahwa kejahatan perang yang tertuang dalam Konvensi

Jenewa bukan merupakan tindak pidana dalam hukum Indonesia. Demikian juga, selama periode mandat CAVR hukum Indonesia tidak mengakui kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, atau penyiksaan (walaupun hal-hal tersebut belakangan ini telah dimasukkan.*

Catatan Akhir

1. Regulasi 10/2001 Bagian 3.1 (b)
2. Regulasi 10/2001 Bagian 13.1 (a) (ii)
3. Regulasi 10/2001 Bagian 13.1 (a)(i)
4. Regulasi 10/2001 Bagian 13.1 (a)(iii)
5. Regulasi 10/2001 Bagian 13.1 (a)(iv)
6. Regulasi 10/2001 Bagian 13.1 (a)(v)
7. Regulasi 10/2001 Bagian 13.1 (a)(vi)
8. Regulasi 10/2001 Bagian 13.1 (c)
9. Regulasi 10/2001 Bagian 13.1 (d)
10. Regulasi 10/2001 Bagian 21
11. Regulasi 10/2001 Bagian 3.1 (e)
12. Regulasi 10/2001 Bagian 3.1 (g)
13. Regulasi 10/2001 Bagian 3.1 (h)
14. Regulasi 10/2001 Bagian 3.1 (f)
15. Regulasi 10/2001 Bagian 3.1 (i)
16. Regulasi 10/2001 Bagian 3.3
17. Regulasi 10/2001 Bagian 13.2
18. Regulasi 10/2001 Bagian 1 (j)
19. Laporan Pertemuan Para Pelapor Khusus/Wakil Ahli dan Ketua Kelompok Kerja Prosedur Khusus Komisi Hak Asasi Manusia dan Program Layanan Saran, Komisi Hak Asasi Manusia PBB, E/CN.4/1997/3, 30 September 1996, paragraf 46; Laporan analitis Sekretaris Jenderal tentang Standar Minimum Humaniter yang sesuai dengan Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 1997/21, E/CN.4/1998/87, 5 Januari 1998, paragraf 59-61.
20. Laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan, Vol. 1, Bab 4, paragraf 77-81.
21. Regulasi 10/2001 Bagian 1 (c)
22. Regulasi 10/2001 Bagian 1 (d)
23. Regulasi 10/2001 Bagian 14
24. Regulasi 10/2001 Bagian 20.1 dan 39
25. Regulasi 10/2001 Bagian 45
26. Regulasi 10/2001 Bagian 44.2
27. Regulasi 10/2001 Bagian 44.2
28. Regulasi 10/2001 Bagian 13.1 (a)(i), (iii) dan 13.1 (c)
29. *International Commission of Inquiry on Timor-Leste to the Secretary General*, UN Document A/54/726 – S/2000/59, 31 Januari 2000
30. Regulasi 10/2001 Bagian 3(c), 13(1)
31. Regulasi 10/2001 Bagian 3(l)(d)
32. Regulasi 10/2001 Bagian 3(l)(e)
33. Pasal 25 Piagam PBB.

* sebagai bagian dari Undang-Undang 26/2000 tentang Pengadilan *Ad Hoc* HAM

34. Resolusi Dewan Keamanan 384 (1975), 22 Desember 1975, paragraf 2; Resolusi Dewan Keamanan 389 (1976), 22 April 1976, paragraf 2.
35. Pasal 2(4) Piagam PBB.
36. *Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v United States of America)* (1986), Laporan ICJ 4, hal. 100.
37. Pasal 51 dan 42, Piagam PBB.
38. Christine Gray, *International Law and the Use of Force*, Oxford, Oxford University Press, 2000, hal. 52.
39. Pasal 73 Piagam PBB.
40. Pasal 73(a) Piagam PBB.
41. Peraturan 10/2001 Bagian 22.1
42. Peraturan 10/2001 Bagian 23
43. Peraturan 10/2001 Bagian 24
44. Peraturan 10/2001 Bagian 25, 26 dan 27
45. Peraturan 10/2001 Bagian 27.7
46. Peraturan 10/2001 Bagian 27.8
47. Peraturan 10/2001 Bagian 28
48. Peraturan 10/2001 Bagian 32
49. Peraturan 10/2001 Skedul 1, paragraf 1
50. Peraturan 10/2001 Bagian 22.2
51. Pasal 25 Piagam PBB
52. *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996) Laporan ICJ 226 hal. 254-255.
53. Resolusi Dewan Keamanan 384, 22 Desember 1975; Resolusi Dewan Keamanan 389, 22 April 1976; Resolusi Sidang Umum 3485 (XXX), 12 Desember 1975; Resolusi Sidang Umum 36/50, 24 November 1981; Resolusi Sidang Umum 37/30, 23 November 1982.
54. *Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, (2004) ICJ paragraf 87.
55. Peraturan 10/2001 Bagian 3 dan 1(e)
56. Peraturan 10/2001 Bagian 1(e)
57. *Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, (2004) ICJ paragraf 102-106; lihat juga *Concluding Observations of the Human Rights Committee on Israel*, 18 Agustus 1998 (CCPR/C/79/Add.93 paragraf 10), dan 21 Agustus 2003 (CCPR/CO/78/ISR paragraf 11); dan *Concluding Observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights on Israel*, 23 Mei 2003, (E/C.12/1/Add.90 paragraf 15 dan 31).
58. *Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, (2004) ICJ paragraf 107-113.
59. Yang paling penting dalam *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*, GA Res 1514 (XV) 14 Desember 1960; *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations*, GA Res 2625 (XXV) 24 Oktober 1970; dan *Definition of Aggression*, GA Res 3314 (XXIX) 14 Desember 1974.
60. *Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory* (2004) ICJ paragraf 88 dan 155-156; *Case Concerning East Timor (Portugal v Australia)* (1995) Laporan ICJ 90 paragraf 29.
61. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 12, paragraf 1
62. Antonio Cassese, *Self-Determination of Peoples*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, hal. 90; *Yearbook of the International Law Commission* (1988) Vol II, bagian 2, hal.64; Lihat juga *Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, (2004) ICJ, Pendapat Terpisah hakim Higgins paragraf 29-30.
63. GA Res 3485 (XXX) 12 Desember 1975; GA Res 31/53, 1 Desember 1976; GA Res 32/34, 28 November 1977; GA Res 33/39, 13 Desember 1978; GA Res 34/40, 21 November 1979; GA Res 35/27, 11 November 1980; GA Res 36/50, 24 November 1981; GA Res 37/30, 23 November 1982.
64. SC Res 384, 22 Desember 1975; SC Res 389, 22 April 1976.
65. Pasal 1(3) ICCPR dan Pasal 1(3) ICESCR

66. Komisi Hak Asasi Manusia *General Comment* 12, paragraf 6
67. Komisi Hak Asasi Manusia *General Comment* 12, paragraf 6
68. Lihat misalnya pendapat terpisah Hakim Higgins (paragraf 30) dan Hakim Kooijmans (paragraf 32) dalam *Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory* (2004) Laporan ICJ.
69. *Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory* (2004) Laporan ICJ, paragraf 88.
70. *Advisory Opinion on the Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South-West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)* (1971) Laporan ICJ 16 paragraf 119; Pendapat terpisah Hakim Separate opinion of Judge Weeramantry dalam *Case Concerning East Timor (Portugal v Australia)* (1995) Laporan ICJ 90, terutama paragraf 204; Pasal 41(2), ILC *Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, International Law Commission, Commentaries on the Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, hal. 287-291 terutama hal. 290.
71. Komisi Hak Asasi Manusia *General Comment* 24, paragraf 8
72. Pasal 4(2) ICCPR; Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 6, paragraf 1
73. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 6, paragraf 7
74. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 6, paragraf 3
75. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 6, paragraf 2; Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 14, paragraf 2
76. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 6, paragraf 4
77. *Jegatheeswara Sarma v Sri Lanka* (2003) HRC Communication No. 950/2000 paragraf 9.3.
78. Lihat Pasal 1(2), Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, Resolusi Sidang Umum 47/133, tertanggal 18 Desember 1992
79. *Quinteros v. Uruguay* (1983) HRC Comm. No. 107/1981 paragraf 14; *Jegatheeswara Sarma v Sri Lanka* (2003) HRC Communication No. 950/2000 paragraf 9.5.
80. Kelompok Kerja PBB tentang Penghilangan Paksa atau Tidak Sukarela, *Fact Sheet* No. 6 (Rev. 2)
81. Pasal 13(1) UDHR dan Pasal 12(1) ICCPR
82. Pasal 12(3) ICCPR; HRC *General Comment* 27, paragraf 11.
83. Pasal 25(1) UDHR dan Pasal 11(1) ICESCR
84. Pasal 11(2) ICESCR
85. CESCR *General Comment* 12 paragraf 8
86. Pasal 2 ICESCR, CESCR *General Comment* No. 12, paragraf 14
87. Komisi Hak Sosial Ekonomi dan Budaya, *General Comment* 12, paragraf 14
88. Komisi Hak Sosial Ekonomi dan Budaya, *General Comment* 12, paragraf 19
89. Komisi Hak Sosial Ekonomi dan Budaya, *General Comment* 15, paragraf 3; Pasal 11(1) ICESCR
90. Pasal 25(1) UDHR; Pasal 11(1) ICESCR; CESCR *General Comment* 4
91. Pasal 3 UDHR, Pasal 6 ICCPR
92. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 6, paragraf 5
93. Lihat keputusan Pengadilan Eropa tentang Hak Asasi Manusia dalam *Engel v The Netherlands* (ECHR 1976 Applic No 5100/71) paragraf 58
94. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 24, paragraf 8
95. Lihat Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB *Fact Sheet* No. 26 tentang Working Group on Arbitrary Detention atau Kelompok Kerja tentang Penahanan Sewenang-wenang; lihat juga misalnya Pendapat 2003 yang dirumuskan oleh Kelompok Kerja tentang Penahanan Sewenang-wenang, E/CN.4/2004/3/Add.1.
96. *Van Alphen v The Netherlands* (HRC Comm. No. 305/1998, 23 Juli 1990).
97. Lihat misalnya keputusan Pengadilan Eropa tentang Hak Asasi Manusia dalam *Quinn v France* (1995) ECHR Applic No. 18580/91.
98. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 8 paragraf 2; Lihat juga *Jijon v Ecuador* (1992) HRC Comm. No. 227/88, saat keterlambatan lima hari dalam membawa tahanan di hadapan hakim dianggap melanggar Pasal 9(3).
99. Pasal 9(3) ICCPR.

100. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 8 paragraf 3.
101. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 8 paragraf 4.
102. Lihat Aturan Standar Minimum Perlakuan Tahanan; Ketentuan mengenai Prinsip Perlindungan Semua Orang dalam Penahanan atau Pemeliharaan Apa pun dan Prinsip Dasar Perlakuan Tahanan.
103. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 29, paragraf 13(a).
104. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 29, paragraf 13(a).
105. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 21, paragraf 3
106. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 20, paragraf 6; Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 7, paragraf 2; *El-Megreisi v Libyan Arab Jamahiriya* (1990) HRC Comm. No. 440/90, paragraf 5.4; *Mukong v Cameroon* (1994) HRC Comm. No. 458/91 paragraf 9.3-9.4.
107. *Mukong v Cameroon* (1994) HRC Comm. No. 458/91 paragraf 9.3-9.4.
108. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 24, paragraf 8; *Prosecutor v Anto Furundzija* (1998) Kasus ICTY No IT-95-17/1, Keputusan Pengadilan, 10 Desember 1998, paragraf 144-155
109. *Prosecutor v Anto Furundzija* (1998) Kasus ICTY No IT-95-17/1, Keputusan Pengadilan, 10 Desember 1998, paragraf 144-155.; Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 24, paragraf 10.
110. Pasal 2(1) CAT.
111. Pasal 16 CAT.
112. Pasal 2(2) CAT.
113. Pasal 4 CAT
114. Pasal 12 dan 13 CAT; Pasal 16 CAT.
115. Pasal 10 CAT; Pasal 11 CAT; Pasal 16 CAT
116. Pasal 15 CAT
117. *GRB v Sweden* (1998) CAT Comm No. 83/1997, paragraf 6.5.
118. *Elmi v Australia* (1999) HRC Communication No. 120/1998, paragraf 6.5.
119. *Prosecutor v Kunarac* (2002) ICTY Appeals Chamber, paragraf 146-147.
120. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 20 paragraf 4.
121. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 20 paragraf 2
122. *Mukong v Cameroon* (1994) HRC Comm. No. 458/91 paragraf 9.4.
123. *Concluding observations of the Committee against Torture on Israel*, A/52/44, 9/5/97 paragraf 257; lihat juga *Ireland v UK* (1978) ECHR Applic No 5310/71, paragraf 96 and 167.
124. *Concluding observations of the Committee against Torture on Israel*, A/52/44, 9/5/97, paragraf 257.
125. *Concluding observations of the Committee against Torture on Israel*, A/52/44, 9/5/97, paragraf 257; lihat juga *Ireland v UK* (1978) ECHR Applic No 5310/71, paragraf 96 and 167.
126. *Concluding observations of the Committee against Torture on Israel*, A/52/44, 9/5/97 paragraf 257.
127. Pasal 16 CAT.
128. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 20, paragraf 2.
129. Pasal 9(2) dan 14(3)(a) ICCPR
130. Pasal 9(3) ICCPR
131. Pasal 14(3)(b) ICCPR.
132. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 13, paragraf 9.
133. Pasal 14(3)(c) ICCPR.
134. Pasal 14(1) ICCPR.
135. *Campbell v Jamaica* (1993) HRC Communication No. 307/1988, paragraf 6.4.
136. *Campbell v Jamaica* (1993) HRC Communication No. 307/1988, paragraf 6.4.
137. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 20, paragraf 12; Pasal 15 CAT.
138. Pasal 14(1) ICCPR
139. *Van Meurs v The Netherlands* (1990) Comm No 215/1986, pada paragraf 6.2; lihat juga *Riepan v Austria* (2000) ECHR, Application no. 35115/97, paragraf 28-31.
140. Pasal 14(2) ICCPR.
141. Pasal 14(3)(d) ICCPR
142. Pasal 14(3)(e) ICCPR
143. Pasal 14(3)(f) ICCPR.

144. Pasal 14(3)(g) ICCPR.
145. *Berry v Jamaica* (1994) HRC Communication No. 330/1988, paragraf 11.7.
146. Pasal 14(5) ICCPR.
147. *Henry v Jamaica* (1991) HRC Communication No. 230/1987, paragraf 8.4; *Little v Jamaica* (1991) HRC Communication No. 283/1988, paragraf 8.5.
148. Pasal 15 ICCPR.
149. Pasal 19 UDHR; Pasal 19 ICCPR.
150. Pasal 20 UDHR; Pasal 21 dan 22 ICCPR.
151. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 10, paragraf 1.
152. Pasal 19(3) ICCPR; Pasal 21 ICCPR; Pasal 22(2) ICCPR; Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 10, paragraf 4; *Kim v Republic of Korea*, (1999) HRC Communication No. 574/1994, paragraf 12.2.
153. *Kim v Republic of Korea*, (1999) HRC Communication No. 574/1994, paragraf 12.5; *Park v Korea* (1998) HRC Communication No. 628/1995, paragraf 10.3.
154. *Park v Korea* (1998) HRC Communication No. 628/1995, paragraf 10.3.
155. *Prosecutor v Anto Furundzija*, ICTY Case No. IT-95-17/1, Trial Chamber Judgment, 10 Desember 1998, paragraf 170-171; 1995 Report of the UN Special Rapporteur on Torture, E/CN.4/1995/34 Paragraf 15-24; *Mejia v. Peru* (1996) Inter-American Commission on Human Rights, Report No. 5/96; *Aydin v. Turkey* (1997) ECHR Applic No 23178/94 paragraf. 83 dan 86.
156. *Prosecutor v Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic*, ICTY Case No IT-96-23 dan IT-96-23/1, Appeals Chamber Judgment, 12 Juni 2002, paragraf 150
157. *Prosecutor v Anto Furundzija*, ICTY Case No IT-95-17/1, Trial Chamber Judgment, 10 Desember 1998, paragraf 170.
158. Pasal 12 UDHR dan Pasal 17 ICCPR; lihat misalnya *Mejia v. Peru* (1996) Inter-American Commission on HR, Report No. 5/96.
159. Menurut Pasal 2 CEDAW; Pasal 2(1) ICCPR, Pasal 2(2) ICESCR; Lihat misalnya CEDAW *General Recommendations* 12 dan 19.
160. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 28, paragraf 8.
161. Pasal 4 UDHR, Pasal 8 ICCPR.
162. *Barcelona Traction, Light and Power Co Ltd (Belgium v Spain)* (1970) ICJ Reports 4 hal. 32.
163. Lihat *Summary record of the 1359th meeting: Nepal*, 21/10/94, CCPR/C/SR.1359 paragraf 41.
164. *Prosecutor v Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic*, ICTY Case No IT-96-23 dan IT-96-23/1, Trial Chamber Judgment, 22 Februari 2001, paragraf 539; *Prosecutor v Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic*, ICTY Case No IT-96-23 dan IT-96-23/1, Appeals Chamber Judgment, 12 Juni 2002, paragraf 124.
165. Pasal 6 CEDAW
166. Lihat juga Pasal 24 ICCPR
167. Pasal 3(1) CRC.
168. Pasal 6 CRC.
169. Pasal 37(a) CRC.
170. Pasal 37(b) CRC.
171. Pasal 24 CRC; Lihat juga ICESCR Pasal 12(2)(a).
172. Pasal 19 CRC
173. Pasal 34 CRC
174. Pasal 36 CRC.
175. Pasal 27 CRC.
176. Pasal 37 CRC; lihat juga ICCPR Pasal 6.
177. Pasal 38(2)-(3) CRC.
178. Pasal 38(3) CRC.
179. Pasal 32; lihat juga Pasal 10(3) ICESCR.
180. Pasal 9 CRC.
181. Pasal 11 dan 35 CRC.
182. Pasal 21 CRC.

183. Pasal 20 CRC.
184. Pasal 8 CRC.
185. Pasal 6 ICESCR dan Pasal 23 UDHR; lihat juga larangan kerja paksa dalam Pasal 8(3) ICCPR.
186. Pasal 7 ICESCR dan Pasal 23 UDHR
187. Pasal 7 ICESCR
188. Pasal 11 ICESCR dan Pasal 25(1) UDHR.
189. Pasal 12 ICESCR
190. Pasal 13 ICESCR, Pasal 26 UDHR, Pasal 28 CRC. Lihat juga Pasal 29 CRC.
191. Pasal 2(1) ICESCR
192. Komisi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, *General Comment* 3, paragraf 1-2.
193. Komisi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, *General Comment* 3, paragraf 10.
194. Komisi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, *General Comment* 3, paragraf 10.
195. Pasal 1(2) ICESCR, Pasal 1(2) ICCPR.
196. Pasal 23 ICCPR.
197. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* No. 19, paragraf 5.
198. Pasal 16(e) CEDAW.
199. Komisi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, *General Comment* 19, paragraf 22 dan 24(m); lihat juga Komisi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, *General Recommendation* 21, paragraf 22.
200. Misalnya Pasal 4 ICCPR.
201. Pasal 4(2) ICCPR.
202. Pasal 4(2) ICCPR.
203. Pasal 4(2) ICCPR.
204. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 29, paragraf 15(a).
205. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 29, paragraf 16.
206. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 29, paragraf 16.
207. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 29, paragraf 14-5.
208. Regulasi 10/2001 Bagian 1(c).
209. Lihat Liesbeth Zegveld, *The Accountability of Armed Opposition Groups in International Law*, Cambridge University Press, 2002, hal. 9-38.
210. *Prosecutor v Akayesu*, ICTR Trial Chamber, Case number ICTR-96-4-T, keputusan tanggal 2 September 1998, paragraf 601.
211. *Prosecutor v Dusko Tadic*, ICTY Case Number IT-94-1, Appeals Chamber Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction (Keputusan Pengadilan Banding tentang Mosi Pengacara untuk Proses Banding tentang Yurisdiksi), 2 Oktober 1995, paragraf 70.
212. Lihat, misalnya, kutipan tentang pertempuran yang berlanjut antara kelompok milisi dan Interfet dalam *Report of the Secretary-General on the United Nations Transitional Administration in Timor-Leste*, S/2000/53, 26 Januari 2000, paragraf 18; *Report of the Security Council Mission to Timor-Leste and Indonesia (9-17 November 2000)*, S/2000/1105, 21 November 2000, paragraf 9.
213. Lihat, misalnya Pasal 1(1) protokol Kedua Konvensi Jenewa 1977.
214. *Prosecutor v Dusko Tadic*, ICTY Case Number IT-94-1, Appeals Chamber Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction (Keputusan Pengadilan Banding tentang Mosi Pengacara untuk Proses Banding tentang Yurisdiksi), 2 Oktober 1995, paragraf 84.
215. Tomàs Gonçalves, Wawancara SCU, 8 Agustus 2000
216. *Prosecutor v Dusko Tadic*, ICTY Case Number IT-94-1, Appeals Chamber Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction (Keputusan Pengadilan Banding tentang Mosi Pengacara untuk Proses Banding tentang Yurisdiksi), 2 Oktober 1995, paragraf 85.
217. Pasal Umum 2, Konvensi Jenewa 1949.
218. Regulasi 10/2001 Bagian 1(d).
219. *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996) ICJ Reports 226 hal. 257.
220. Pasal 25 Regulasi Den Haag; Pasal 27 Konvensi Jenewa IV; Pasal 51(2) dan 57(1) dan (2)(a) Protokol Jenewa I; Pasal 52(1) Protokol Jenewa I.
221. Pasal 33-34 Konvensi Jenewa IV; Pasal 51(2) Protokol Jenewa I.

222. Pasal 53 dan 54(2) Protokol Jenewa I.
223. Pasal 33 Konvensi Jenewa IV; Pasal 51(6) dan 52(1) Protokol Jenewa
224. Pasal 33 Konvensi Jenewa IV.
225. Pasal 54 Protokol Tambahan Pertama Konvensi Jenewa yang mencerminkan hukum kebiasaan internasional.
226. Pasal 23 Konvensi Jenewa IV.
227. Pasal 51(4) dan (5) Protokol Jenewa I; *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996) ICJ Reports 226 hal. 257.
228. Pasal 51(5)(b) dan Pasal 57(2)(a)(iii) dan (b) Protokol Jenewa I.
229. Pasal 57(3) Protokol Jenewa I.
230. Pasal 26 Regulasi Den Haag; Pasal 57(2)(c) Protokol Jenewa I.
231. *Prosecutor v Tadic*, Appeals Chamber decision on Jurisdiction (Keputusan Pengadilan Banding tentang Yurisdiksi), paragraf 125.
232. Pasal 50(1) dan 43 Protokol Jenewa I dan Pasal 4A Konvensi Jenewa III.
233. Pasal 50(1) Protokol Jenewa I.
234. Pasal 50(3) Protokol Jenewa I.
235. Pasal 52(1) Protokol Jenewa I.
236. Pasal 52(2) Protokol Jenewa I.
237. Pasal 4A(6) Konvensi Jenewa III.
238. Pasal 4A Konvensi Jenewa III.
239. Wawancara CAVR dengan Jacinto Alves, mantan asisten Kepala Staf Falintil, Dili 3 Mei 2005.
240. Pasal 5 Konvensi Jenewa III; Pasal 45(1) Protokol Jenewa I.
241. Pasal 4, Regulasi Den Haag, Pasal 13 Konvensi Jenewa III.
242. Pasal 13 dan Pasal 17 Konvensi Jenewa III.
243. Pasal 15, 26, 30 Konvensi Jenewa III.
244. Pasal 19 dan 23 Konvensi Jenewa III.
245. Pasal 5 Konvensi Jenewa IV.
246. Pasal 22 Regulasi Den Haag; Pasal 35(1) Protokol Jenewa I; *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996) ICJ Reports 226 hal.256.
247. Deklarasi St Petersburg 1868; Pasal 23 Regulasi Den Haag; Pasal 35(2) Protokol Jenewa I; *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996) ICJ Reports 226 hal. 257.
248. Pasal 51(4) Protokol Jenewa I; *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996) ICJ Reports 226 hal. 257.
249. Lihat juga Pasal 54(1)-(2) Protokol Jenewa I.
250. Pasal 23 Regulasi Den Haag.
251. Pasal 51 Konvensi Jenewa IV.
252. Pasal 51 Konvensi Jenewa IV.
253. Pasal 46 Regulasi Den Haag, Pasal 27(1) dan 53 Konvensi Jenewa IV.
254. Pasal 32, Konvensi Jenewa IV.
255. Pasal 55, Konvensi Jenewa IV; lihat juga Pasal 56 Konvensi Jenewa IV tentang perawatan kesehatan dan Pasal 59-62 tentang penerimaan bantuan.
256. Pasal 50 Konvensi Jenewa IV.
257. Pasal 27 Konvensi Jenewa IV.
258. Pasal 43 Regulasi Den Haag.
259. Pasal 45 Regulasi Den Haag.
260. Pasal 65-75 Konvensi Jenewa IV; lihat juga Pasal 23(h) Regulasi Den Haag.
261. Pasal 49 Konvensi Jenewa IV.
262. Pasal 43 Regulasi Den Haag dan Pasal 64 Konvensi Jenewa IV.
263. Pasal 66 Konvensi Jenewa IV.
264. Pasal 51 Konvensi Jenewa IV.
265. Pasal 51 Konvensi Jenewa IV; lihat juga secara umum Pasal 23 Regulasi Den Haag.
266. Pasal 51 Konvensi Jenewa IV.

267. Pasal 44 Regulasi Den Haag.
268. *In re Krupp and Others* (1948) 15 Annual Digest 620 hal. 622-623, *NV De Bataafsche Petroleum Maatschappij and others v The War Damage Commission* (1956) 23 ILR 810 hal. 822.
269. Pasal 52 Regulasi den Haag 1907; lihat juga Pasal 55 Konvensi Jenewa IV.
270. Pasal 42 Regulasi den Haag 1907; *Prosecutor v Naletilic and Martinovic Trial Chamber Judgment*, 31 Maret 2003, paragraf 216.
271. *Prosecutor v Naletilic and Martinovic Trial Chamber Judgment*, 31 Maret 2003, paragraf 217
272. Resolusi Sidang Umum PBB 2444 (XXIII), 19 Desember 1968, paragraf 1(b) dan Resolusi Sidang Umum PBB 2675 (XXV), 9 Desember 1970, paragraf 4.
273. Resolusi Sidang Umum PBB 2675 (XXV), 9 Desember 1970, paragraf 3.
274. Resolusi Sidang Umum PBB 2675 (XXV), 9 Desember 1970, paragraf 5 dan 6.
275. Resolusi Sidang Umum PBB 2675 (XXV), 9 Desember 1970, paragraf 7.
276. Resolusi Sidang Umum PBB 2444 (XXIII), 19 Desember 1968, paragraf 1(c) dan Resolusi Sidang Umum PBB 2675 (XXV), 9 Desember 1970, paragraf 4.
277. Resolusi Sidang Umum PBB 2444 (XXIII), 19 Desember 1968, paragraf 1(a); *Prosecutor v Tadic*, Appeals Chamber decision on Jurisdiction (Keputusan Pengadilan banding tentang Yurisdiksi), paragraf 119.
278. *Prosecutor v Dusko Tadic*, ICTY Case Number IT-94-1, Appeals Chamber Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction (Keputusan Pengadilan Banding tentang Mosi Pengacara tentang Proses banding Yurisdiksi), 2 Oktober 1995, paragraf 119.
279. Lihat misalnya Pasal 23 Regulasi Den Haag 1907; *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996) ICJ Reports 226 hal. 257.
280. Lihat misalnya *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996) ICJ Reports 226 hal. 257.
281. Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida 1948, Pasal 2
282. Lihat Pasal 7(2)(b) Statuta Roma ICC
283. Pasal 6(c) Piagam London untuk Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg, Pasal 5 Statuta ICTY, Pasal 3 Statuta ICTR, Pasal 7(1) Statuta Roma ICC
284. Piagam London tentang IMT Nuremberg
285. Giorgio Gaja, "The Long Journey towards Repressing Aggression" dalam Antonio Cassese dkk. (editor), *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary*, Oxford, Oxford University Press, 2002, hal. 435-438; Yoram Dinstein, *War, Aggression and Self-Defence* (Edisi Ketiga), Cambridge, Cambridge University Press, 2001 hal. 114-116.
286. Lihat Pasal 50 Konvensi Jenewa I; Pasal 51 Konvensi Jenewa II; Pasal 130 Konvensi Jenewa III; dan Pasal 147 Konvensi Jenewa IV
287. Paragraf (1)-(4) tertuang dalam Piagam London tentang IMT Nuremberg, Pasal 6(b)
288. Paragraf (5)-(7) tertuang dalam Statuta ICTY, Pasal 3.
289. *Prosecutor v Tihomir Blaskic*, ICTY Case No IT-95-14-T, Trial Chamber Judgment, 3 Maret 2000, paragraf 170, 180.
290. *Prosecutor v Tihomir Blaskic*, ICTY Case No IT-95-14-T, Trial Chamber Judgment, 3 March 2000, paragraf 187.
291. *Prosecutor v Anto Furundzija*, ICTY Case No IT-95-17/1-T, Trial Chamber Judgment, 10 Desember 1998, paragraf 168.
292. *Prosecutor v Dragoljub Kunurac and others*, ICTY Case No IT-96-23&23/1, Appeals Chamber Judgement, 12 Juni 2002, paragraf 148.
293. *Prosecutor v Dusko Tadic*, ICTY Case Number IT-94-1, Appeals Chamber Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 Oktober 1995, paragraf 134.
294. Pasal Umum 3, Konvensi Jenewa 1949.
295. Lihat *Prosecutor v Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic and Esad Landzo*, ICTY Case No IT-96-21, Appeals Chamber Judgment, 20 Februari 2001, paragraf 196-198.
296. Lihat contoh Pasal 7(3) Statuta ICTY; Pasal 6(3) Statuta ICTR; dan Pasal 28 Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional 1998.
297. *Armando dos Santos v The Prosecutor General*, Kasus No. 16/2001, 15 Juli 2003; *Agustinho da Costa v The Prosecutor General*, Kasus No. 07/2000, 18 Juli 2003.

298. *The Public Prosecutor v João Sarmento and Domingos Mendonça*, Kasus No. 18a/2001, hal.10-13.
299. Pasal 1 Undang-Undang 10/2003, 10 Desember 2003
300. Pasal 64 Konvensi Jenewa IV.
301. Myres S. McDougal dan Florentino P. Feliciano, *The International Law of War*, New Haven, New Haven Press, 1994, hal.760
302. Pasal 328 Kitab Undang-Undang Pidana Portugis ("Penahanan").
303. Pasal 329 Kitab Undang-Undang Pidana Portugis ("Pemaksaan Secara Fisik").
304. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Pidana Portugis ("Penahanan Pribadi").
305. Pasal 331 Kitab Undang-Undang Pidana Portugis ("Perubahan Khusus dalam Kejahatan Penahanan Pribadi").
306. Pasal 332 Kitab Undang-Undang Pidana Portugis.
307. Pasal 328 Kitab Undang-Undang Pidana Portugis ("Kekerasan terhadap tahanan sebagai Pribadi").
308. Pasal 349 ("Pembunuhan Sederhana yang Kejam"), Pasal 350 ("Percobaan Pembunuhan dan Pembunuhan yang Gagal"), dan Pasal 351 ("Pembunuhan Bersyarat").
309. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugis Pasal 359 ("Tindak pidana yang disengaja"), Pasal 360 ("Tindak pidana yang mengakibatkan penderitaan atau ketidakmampuan untuk bekerja"), Pasal 361 ("Tindak pidana yang mengakibatkan kehilangan kesadaran mental, tidak mampu secara permanen untuk bekerja, atau pun kematian"), dan Pasal 362 ("Tindak pidana yang mengakibatkan kematian dalam kondisi kecelakaan").
310. Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugis ("Penggunaan dan Ancaman dengan Senjata Api atau Senjata Berpeluru")
311. Pasal 370-375, 377, 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugis
312. Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugis ("Pendobrakan Rumah Orang Asing").
313. Pasal 463-470 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugis
314. Pasal 472-473 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugis.
315. Pasal 474 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugis.
316. Pasal 477, 479, dan 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugis.
317. Pasal 478 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugis.
318. UU No.7 tahun 1976 Tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (LN No.35/1976); PP No.19 of 1976 Tentang Pengukuhan Penyatuan wilayah Timor Timur ke dalam negara Kesatuan Republik Indonesia (LN No. 39/1976), dikukuhkan pada 1978 dengan TAP MPR-RI No. VI/MPR/1978
319. Keputusan Presiden No. 11/PNPS/1963, yang pada 1969 dijadikan Undang-Undang No. 5/1969
320. Undang-Undang No. 5/1963, yang dijadikan Undang-Undang No. 5/1969.
321. Pasal 187, 191 bis, 191 ter, 200 KUHP.
322. Pasal 202 KUHP.
323. Pasal 187 KUHP.
324. Pasal 289 dan 290 KUHP.
325. Pasal 297 KHUP.
326. Pasal 324 KUHP
327. Pasal 328 KUHP.
328. Pasal 330 KUHP.
329. Pasal 333 KUHP.
330. Pasal 338 dan 339 KUHP.
331. Pasal 340 KUHP.
332. Pasal 351-353 KUHP.
333. Pasal 354 dan 355 KUHP.
334. Pasal 362, 363, dan 365 KUHP.
335. Pasal 406, 407, 408 dan 409 KUHP.
336. Pasal 148 KUHP
337. Pasal 173 KUHP
338. Pasal 175 KUHP.

- 339. Pasal 181 KUHP.
- 340. Pasal 92(3) KUHP
- 341. Pasal 52 KUHP.
- 342. Pasal 421 KUHP
- 343. Pasal 422 KUHP
- 344. Misalnya Undang-Undang No. 40/1947 tentang Hukum Disiplin Militer dan Undang-Undang No. 6/1950 tentang Prosedur Kriminal Sistem Peradilan Militer dan juga Undang-Undang No. 1/Drt/1958.

